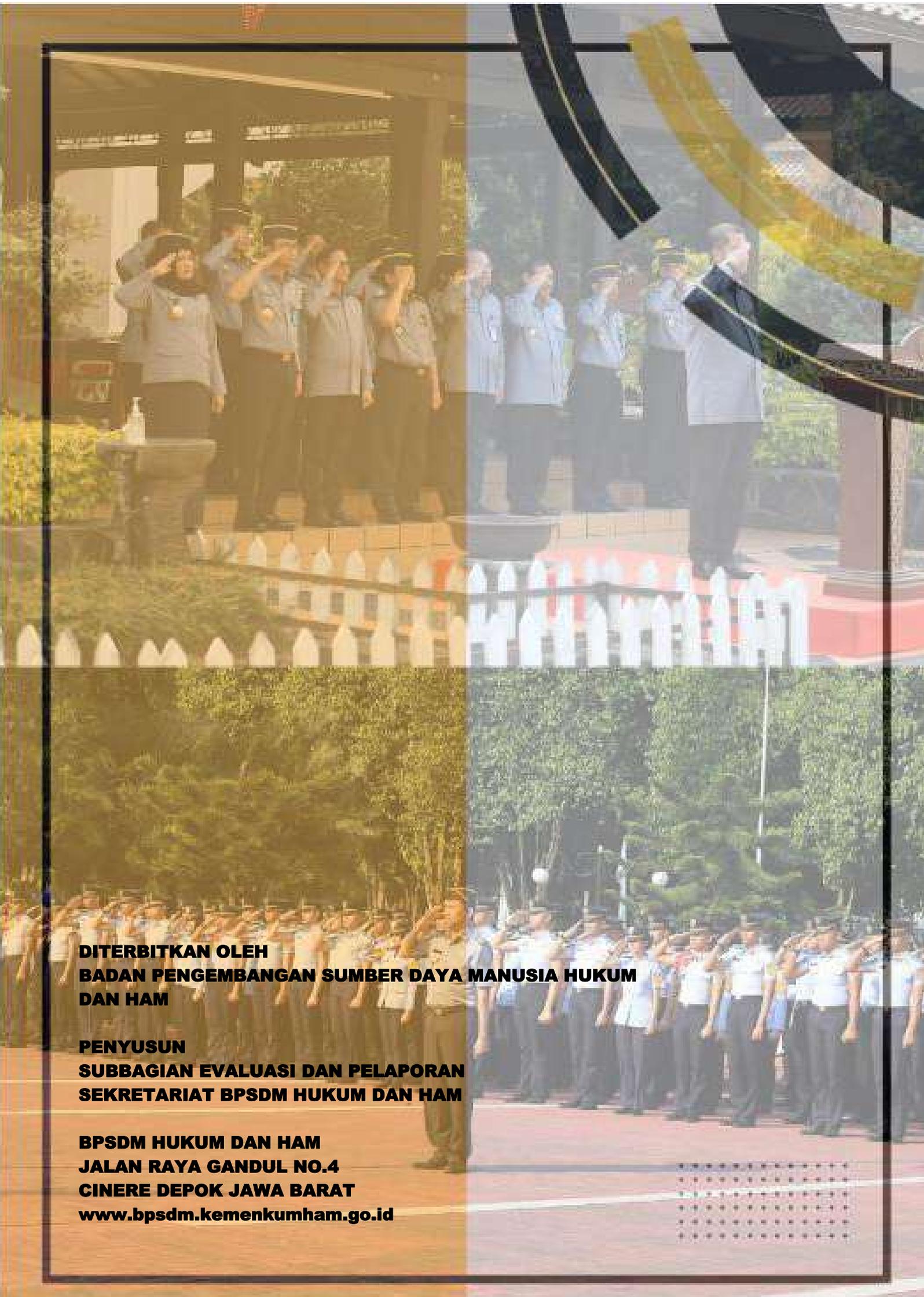




LAPORAN TAHUNAN 2023

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



**DITERBITKAN OLEH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
DAN HAM**

**PENYUSUN
SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM**

**BPSDM HUKUM DAN HAM
JALAN RAYA GANDUL NO.4
CINERE DEPOK JAWA BARAT
www.bpsdm.kemenkumham.go.id**



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, serta penilaian kompetensi pada Tahun Anggaran 2023.

Laporan Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaporkan kinerja organisasi serta kinerja anggaran selama Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Tahunan ini mencakup keberhasilan, hambatan, serta tantangan yang dihadapi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun Anggaran 2023.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Tahunan ini. Dengan tersusunnya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Tahun 2023. Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami terbuka dan menerima segala kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi

Kepala BPSDM Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi, Tugas dan Fungsi	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Ruang Lingkup Pembahasan	8
E. Sumber Daya Manusia	8
F. Sistematika Pelaporan	9
BAB II DATA RENCANA KERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kegiatan	13
C. Rencana Penyerapan Anggaran	41
BAB III PELAKSANAAN KINERJA	42
A. Capaian Kinerja	42
B. Implementasi Reformasi Birokrasi	89
BAB IV PENUTUP	97
A. Simpulan	97
B. Saran	98



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Hukum dan HAM) merupakan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hukum dan hak asasi manusia. BPSDM Hukum dan HAM bertanggung jawab dalam melakukan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bentuk pengembangan SDM yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah Pendidikan dan Pelatihan. Pendidikan diselenggarakan oleh satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM yaitu Politeknik Ilmu Pemasarakan dan Politeknik Imigrasi. Pengembangan SDM dalam bentuk Pelatihan diselenggarakan oleh unit BPSDM Hukum dan HAM yaitu Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan serta Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM.

Pada Tahun Anggaran 2023, BPSDM Hukum dan HAM telah menyelenggarakan pengembangan dengan output peserta sebanyak 141.099 pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Output tersebut dapat tercapai karena BPSDM Hukum dan HAM telah melakukan peningkatan dalam hal pelayanan pelatihan dengan cara menambah metode pengembangan kompetensi yaitu *Massive Open Online Courses* (MOOC). Dengan bertambahnya metode pengembangan kompetensi, output pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang mendapatkan pengembangan kompetensi dapat melebihi target yang telah ditetapkan walaupun pada tahun tersebut BPSDM Hukum dan HAM beberapa kali mengalami *Automatic Adjustmen*. Dari jumlah output pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi,

sebanyak 12.822 pegawai mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan baik secara klasikal maupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), tatap Muka dan sejumlah 128.277 pegawai mengikuti pengembangan kompetensi dengan metode lainnya seperti Webinar, Community of Practice, MOOC dan e-Learning. BPSDM Hukum dan HAM juga menyelenggarakan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 267 peserta dan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 312 peserta sebagai bentuk pemenuhan kegiatan berskala program prioritas nasional.

BPSDM Hukum dan HAM juga menyelenggarakan pendidikan sehingga mencetak kader di bidang masyarakat dan keimigrasian melalui Poltikenik Ilmu Masyarakat (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM). Pada Tahun Anggaran 2022, sebanyak 1.346 taruna mengikuti pendidikan kedinasan POLTEKIP dan sebanyak 1.201 taruna mengikuti pendidikan kedinasan POLTEKIM. Pada akhir tahun 2023, sebanyak 310 taruna Tingkat IV POLTEKIP dan 295 taruna Tingkat IV POLTEKIM dinyatakan lulus mengikuti pendidikan kedinasan dan ditempatkan sesuai dengan kompetensinya.

Selain penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, BPSDM Hukum dan HAM juga menyelenggarakan penilaian kompetensi bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM melalui Pusat Penilaian Kompetensi. Pada Tahun Anggaran 2023, Pusat Penilaian Kompetensi telah melakukan penilaian kompetensi kepada 15.931 pegawai melalui kegiatan Penilaian Kompetensi dan Potensi, serta Penilaian Preferensi Kompetensi. Hasil penilaian kompetensi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar untuk pembentukan pola karir dan pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dari sisi penyerapan anggaran, Per 31 Desember 2023 BPSDM Hukum dan HAM telah mencatat realisasi anggaran sebesar Rp. 298.183.938.444,- atau telah mencapai 97,57% dari pagu anggaran yang terdapat dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 305.611.935.000,-. Berikut rincian pagu anggaran serta realisasi per unit dan satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM:

No	BAGIAN/SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM	10.252.787.000,-	9.296.069.945,-	90,67%
2	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	3.918.300.000,-	3.848.224.898,-	98,21%

3	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	55.807.740.000,-	51.624.220.178,-	92,50%
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BPSDM (SEKRETARIAT)	114.052.258.000,-	112.486.909.605,-	98,63%
5	POLTEKIM	42.255.699.000,-	42.159.048.834,-	99,77%
6	POLTEKIP	43.660.237.000,-	43.554.297.177,-	99,76%
7	Badiklat Kepulauan Riau	8.910.874.000,-	8.867.255.240,-	99,51%
8	Badiklat Jawa Tengah	14.287.752.000,-	13.991.995.026,-	97,93%
9	Badiklat Sulawesi Utara	12.466.288.000,-	12.355.917.541,-	99,11%
TOTAL REALISASI		305.611.935.000,-	298.183.938.444,-	97,57%

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM sebagai pelaksana dalam pengembangan kompetensi aparatur di bidang hukum dan HAM, terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah adanya kebijakan *Automatic Adjustmen*. *Automatic Adjustment* merupakan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran secara otomatis, mencakup realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja Negara, penyesuaian pagu, dan/atau pergeseran anggaran antarprogram. Dengan adanya kebijakan tersebut, beberapa kegiatan pelatihan serta penilaian kompetensi di tahun 2023 tidak dapat terlaksana atau harus di revisi. Kendala lainnya adalah kurangnya jumlah SDM asesor yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan penilaian kompetensi kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM setiap tahunnya.

Upaya yang bisa dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM untuk menghasilkan peserta pelatihan yang berkompeten di bidangnya antara lain, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, kurikulum dan modul yang selalu up to date serta pengawasan terhadap satuan kerja di bawah BPSDM Hukum dan HAM secara berkala terhadap capaian kinerja, pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.



BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN TAHUNAN
BPSDM HUKUM DAN HAM

TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan Kompetensi ASN menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pengembangan Kompetensi ASN banyak menghadapi permasalahan baik yang datang dari dalam maupun dari luar pemerintah. Banyak kebijakan pengembangan kompetensi belum didasarkan pada analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Permasalahan lain yang mendasari adalah Pengembangan Kompetensi hanya diartikan secara sempit sebagai pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara klasikal serta dilakukan secara terpisah dengan pola karir. Hal demikian yang merujuk untuk disusun kebijakan tentang pengembangan kompetensi bagi ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 49 antara lain:

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
- (2) Pembelajaran dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi;
- (3) Pembelajaran terintegrasi merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN yang terintegrasi dengan pekerjaan, sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN, serta terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil wajib dipenuhi paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pemerintah telah merespon kebijakan ini dengan menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM serta Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri tersebut menegaskan bahwa negara telah menyiapkan proyeksi pemetaan karier dan menyediakan wadah pembelajaran yang telah mengadopsi pemanfaatan teknologi dalam metode pembelajarannya. Negara membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang profesional menerapkan *core value* Ber-AKHLAK, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

**Berorientasi Pelayanan**

Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

**Akuntabel**

Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

**Kompeten**

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

**Harmonis**

Saling peduli dan menghargai perbedaan

**Loyal**

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

**Adaptif**

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan

**Kolaboratif**

Membangun kerjasama yang sinergis

Menjalankan tugas sebagai *leading sector* di bidang pengembangan sumber daya manusia Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan pengembangan SDM melalui pengembangan kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai dan penguatan unit kediklatan agar semakin berkualitas, cerdas,

terampil dan bermartabat melalui Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis dan Fungsional serta Manajerial dan Sosial Kultural.

B. Organisasi , Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM terdiri dari beberapa satuan kerja yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

SEKRETARIAT BPSDM HUKUM DAN HAM

.....
Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko;
- d. koordinasi dan pengelolaan urusan sumber daya manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan perlindungan hukum pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepastakaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN

.....

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis rencana, program, dan anggaran di bidang pelatihan teknis dan kepemimpinan;

- a. penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- b. penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAM

.....

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan fungsional dan HAM. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- b. penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- c. penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- d. koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia

PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI

.....

Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penilaian kompetensi;
- b. penyusunan standardisasi dan penilaian kompetensi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi;
- d. pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penilaian Kompetensi.

POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

Poltekip memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekip memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Ilmu Pemasyarakatan;
- b. melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Pemasyarakatan.

POLITEKNIK IMIGRASI

Politeknik Imigrasi memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekim memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Keimigrasian;
- b. melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Keimigrasian.

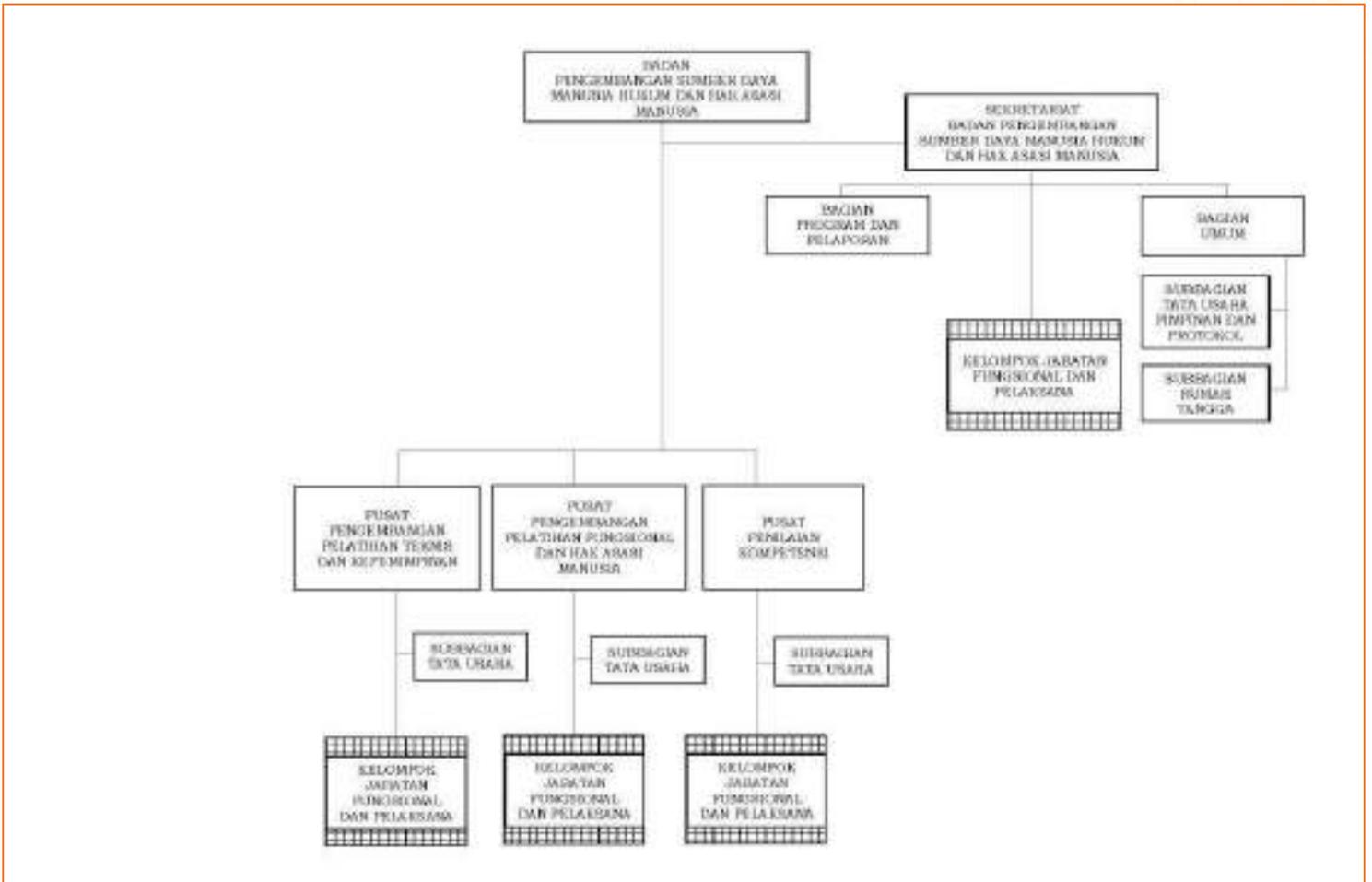
BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM (Kep. Riau, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara)

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM yang berada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara dengan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Pendirian Balai Diklat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan HAM



C. Maksud dan Tujuan

Laporan Tahunan merupakan laporan yang disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM selama satu tahun kegiatan. Maksud dan Tujuan pembuatan Laporan Tahunan 2023 BPSDM Hukum dan HAM untuk:

1. Memberikan informasi kepada pimpinan organisasi berkenaan tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun 2023;

2. Bahan masukan Pimpinan BPSDM Hukum dan HAM dalam hal pengambilan keputusan berkenaan dengan model pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia hukum dan HAM serta program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

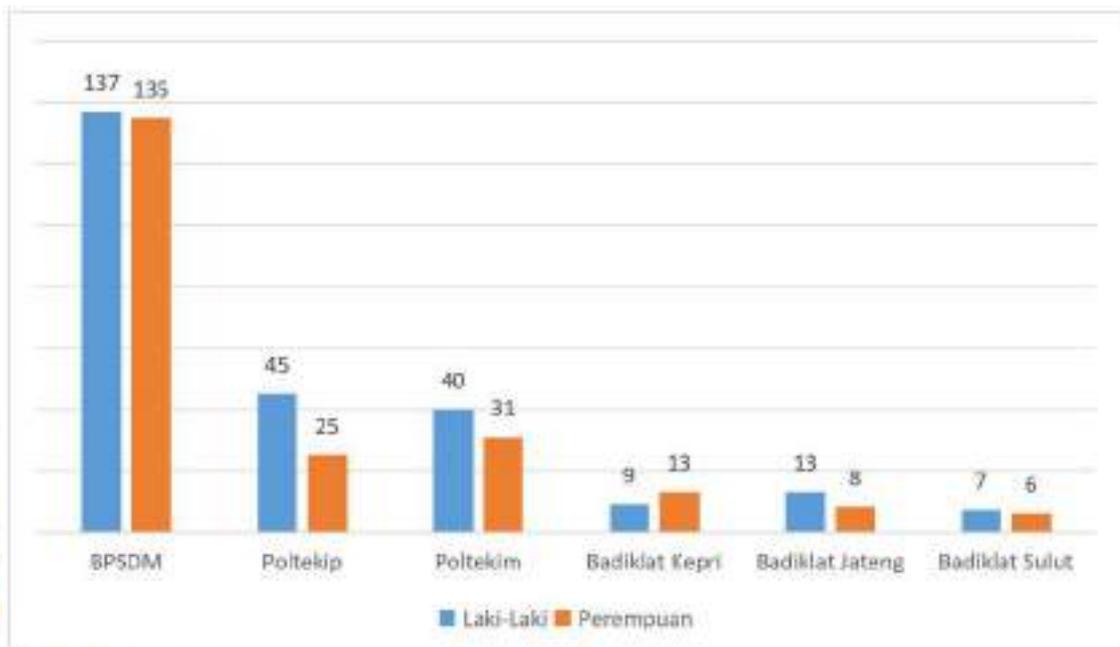
Ruang lingkup pembahasan pada Laporan Tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM baik dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun non-diklat pada tahun 2023;
2. Pengelolaan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM selama tahun anggaran 2023.

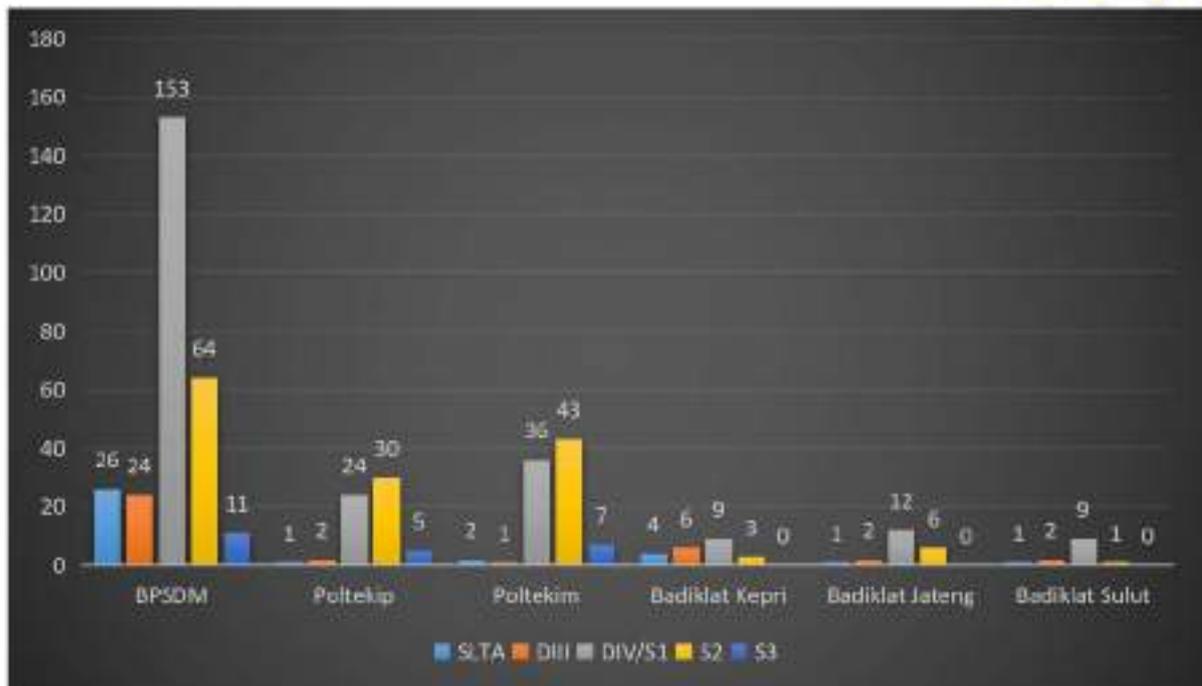
E. Sumber Daya Manusia

BPSDM Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 411 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



F. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Tahunan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023 tidak terlepas dalam Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Hukum dan HAM, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

Pada Bagian ini menguraikan gambaran umum dari satuan kerja dan hal-hal yang mendasari disusunnya laporan tahunan.

BAB II DATA RENCANA KINERJA;

Bagian ini menyajikan data dan kenyataan yang ada dilapangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA

Bagian ini menyajikan analisa terhadap data dan kenyataan di lapangan mengenai hambatan serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN;

Bagian ini membuat saran dan usulan untuk mendapatkan pemecahan dan penyelesaian dari permasalahan yang ada.



BAB II DATA RENCANA KINERJA

LAPORAN TAHUNAN
BPSDM HUKUM DAN HAM

TAHUN 2023

BAB II DATA RENCANA KERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mewujudkan visi dan misi itu maka disusunlah Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dengan indikator kinerja dan target yang harus dipenuhi setiap tahun.

SASARAN STRATEGIS



Sasaran Strategis tersebut kemudian diturunkan kepada masing-masing Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM kedalam 4 program yaitu program Dukungan Manajemen, program Penegakan dan Pelayanan Hukum, program Pembentukan Regulasi, serta program Pemajuan dan Penegakan HAM dengan sasaran program sesuai dengan masing-masing Unit Eselon I termasuk BPSDM Hukum dan HAM. Berikut Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024

PROGRAM
Dukungan Manajemen



SASARAN PROGRAM

- 1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang hukum dan hak asasi manusia**
- 2. Terpenuhiya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian**

Sasaran Program	Indikator Kinerja
Meningkatkan kompetensi SDM di bidang hukum dan hak asasi manusia	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna
	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi
	Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya
Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang masyarakat dan keimigrasian	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi Politeknik Ilmu Masyarakat yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan

Untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tiap-tiap indikator pada sasaran program tersebut, BPSDM Hukum dan HAM pada diberikan pagu tahun 2023 sebesar Rp. 255.408.806.000,- yang terbagi menjadi 9 rincian kegiatan. Namun, ditengah tahun berjalan terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* serta penambahan anggaran sehingga anggaran yang tersedia sebesar Rp. 305.611935.00,- dengan rincian sebagai berikut:

● Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM	Rp. 10.252.787.000,-
● Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur	Rp. 3.918.300.000,-
● Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 55.807.740.000,-
● Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 114.052.258.000,-
● Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan bidang Masyarakat	Rp. 43.660.237.000,-
● Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan bidang Imigrasi	Rp. 42.255.699.000,-
● Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)	Rp. 8.910.874.000,-
● Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)	Rp.14.287.752.000,-
● Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)	Rp. 12.466.288.000,-

B. Rencana Kegiatan

Dari anggaran yang telah diterima tersebut kemudian diwujudkan ke dalam berbagai kegiatan pada unit dan satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Berikut rencana kegiatan tahun 2023 pada masing-masing unit dan satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM

1. Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan fungsional dan Hak Asasi Manusia. Pada Tahun 2023 Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mengalokasikan pagu sebesar Rp. 10.252.787.000,- untuk melaksanakan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang fungsional dan HAM serta Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM sesuai dengan fungsinya

- **Perencanaan Pengembangan Kompetensi**

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai anggaran sebesar Rp. 3.121.994.000,- yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan Pengembangan Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Fungsional dan HAM 2. Penyusunan Modul Penjenjangan Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Muda 3. Sosialisasi <i>Massive Open Online Course</i> (Mooc) Pada Kantor Wilayah 4. Penyusunan Modul Penjenjangan Pelatihan Fungsional 5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan 6. Workshop Writing Camp Untuk Pejabat Fungsional Dilingkungan BPSDM Hukum dan Ham 7. Penguatan Simulasi <i>Ice Breaking</i> dan Dinamika Kelompok Bagi Penyelenggara Pelatihan 8. Konsolidasi Pelatihan Fungsional Pada 3 (Tiga) Balai Diklat 9. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda 10. Reviu Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum
-------------------------------------	--

	11. Worskhop Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum
Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Pelatihan 2. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Muda 3. Penyusunan Modul Penjurangan Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Muda 4. Reviu Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

- **Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi**

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai anggaran sebesar Rp. 6.474.059.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan pelatihan sebagai berikut:

	PELATIHAN	TARGET
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi - RM	Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Keahlian	14
	Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama	60
	Pelatihan Fungsional Perancang Ahli Pertama	50
	Pelatihan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Pemula	320
	Pelatihan Fungsional Calon Analis Kebijakan	6
	Pelatihan Fungsional Auditor Terampil	1
	Pelatihan Fungsional Penjurangan Auditor Ahli Muda Metode Blended Learning	15
	Pelatihan Fungsional Analis Hukum	150
	Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda	30
	TOT Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional Analis Hukum	30
	Pelatihan Penjurangan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	30
	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Blended Learning	54
	Massive Open Online Course (MOOC)	21.000
	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional Pengaman Kemasyarakatan	30
Penyelenggaraan	Diklat Fungsional Calon Perancang Peraturan	25

Pengembangan Kompetensi - PNBP	Perundang-undangan (PNBP)	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	40
	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama	160
	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning	120
Total		22.135

- **Penyusunan Laporan dan Evaluasi**

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai anggaran sebesar Rp. 656.734.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi

1. Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan Fungsional dan HAM
2. Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Keimigrasian

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan

2. Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan. Pada Tahun 2023 Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menganggarkan pagu sebesar Rp. 55.807.740.000,- untuk melaksanakan layanan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang teknis dan kepemimpinan serta Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya.

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan sesuai dengan fungsinya

- **Perencanaan Pengembangan Kompetensi**

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai anggaran sebesar Rp. 2.585.478.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan Pengembangan Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Dokumen Rencana Kegiatan dan Kebijakan Diklat Teknis Dan Kepemimpinan 2. Review Dan Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS (Penyusunan Panduan Aktualisasi, PKTBT, dan Habitiasi Latsar CPNS) 3. FGD Review RBPP, RBPMP dan Pedoman Pelatihan Teknis Pemasaryakatan Metode E-Learning 4. Monitoring Persiapan dan Pelaksanaan PKA PKP 5. Penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis 6. Penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis
Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	Perencanaan Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya

- **Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi**

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai anggaran sebesar Rp. 52.603.985.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan pelatihan sebagai berikut:

	PELATIHAN	TARGET
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi - RM	Pelatihan Dasar CPNS Bagi Alumni Poltekip dan Poltekim Metode Blended Learning	587
	Pendidikan Khusus Keimigrasian Bagi Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	1
	Massive Open Online Course (MOOC) Best Practice Keimigrasian	17.140
	Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi	40

(Pelopor)	
Pelatihan Dasar CPNS - LAN	20
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - LAN	1.601
Pelatihan Kepemimpinan Administrator - LAN	140
Pelatihan Refleksi Dan Aktualisasi Integritas (Prestasi)	40
Pelatihan Fasilitator Daring	30
Impactful Communication Skills Offline Training	60
MOOC Manajemen Resiko	3.678
MOOC Pendaftaran Merk	790
MOOC Penyelenggaraan Pengawasan	1.945
MOOC Perseroan Perorangan	540
MOOC SIPKUMHAM	648
MOOC Tentang Imigrasi	3.337
MOOC Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	-
MOOC Pelayanan Publik Tk. Dasar	-
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	13
Pelatihan Kepemimpinan Administrator	80
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	160
Pendidikan Khusus Keimigrasian Bagi Lulusan Program D-IV Politeknik Imigrasi	247
Pendidikan Khusus Keimigrasian Bagi Lulusan Program D-IV Politeknik Imigrasi	30
Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer	30
Pelatihan Assesment Resiko	200
Pelatihan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar Metode PJJ	40
Pelatihan Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib Metode PJJ	40

	Pelatihan Pengadministrasian Dan Perlengkapan Keamanan Metode PJJ	40
	Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Metode PJJ	160
	Massive Open Online Course (MOOC) Reformasi Birokrasi	18.483
	Massive Open Online Course (MOOC) Muatan Teknis Substansi Lembaga	587
	Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif	26
	Pelatihan TI	26
	Digital Learning	31
	Pelatihan Penyelenggaraan SAKIP Di Lingkungan K/L	9
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	Pelatihan SPPA	270
Total		51.069

- **Penyusunan Laporan dan Evaluasi**

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi pada Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai anggaran sebesar Rp. 652.112.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Per Kegiatan Diklat Teknis dan Kepemimpinan 2. Evaluasi Pasca Pelatihan PKN TK.II, PKA, PKP dan Pelatihan Dasar CPNS 3. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pedoman dan Instrumen Evaluasi Pelatihan Pada Badiklat
Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya

3. Pusat Penilaian Kompetensi

Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Tahun 2023 Pusat Penilaian Kompetensi menganggarkan pagu sebesar Rp. 3,918,300,000,- untuk melaksanakan layanan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan kompetensi.

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pusat Penilaian Kompetensi sesuai dengan fungsinya

- **Perencanaan Penilaian Kompetensi**

Perencanaan Penilaian Kompetensi pada Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.216.931.000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan Kompetensi	Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Program Penilaian Kompetensi 2. Penyusunan Desain Simulasi 3. Penyusunan Sub Indikator Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Level IV 4. Penyusunan Pedoman Penyampaian Feedback dan Laporan Hasil Penilaian Kompetensi 5. Workshop Pengembangan Asesor Dalam Simulasi Business Games
------------------------	-----------	---

- **Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi**

Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi pada Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai anggaran sebesar Rp. 2,130,654,000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Penilaian Kompetensi	Lokus	Target
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kantor Wilayah D.I Yogyakarta	60
	Kantor Wilayah Maluku Utara	60
	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	60
	Kantor Wilayah Gorontalo	60
	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	60
	Kantor Wilayah Jambi	60
	Kantor Wilayah Papua	60

	Unit Eselon I	80
Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM	Penilaian Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain	400
	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	
	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemetaan Kompetensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	
	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat dan Asisten Pembimbing Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.	
	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan JF Perancang Perundang-undangan	
	Penilaian Kompetensi Jabatan Analis Hukum (perpindahan jabatan)	
	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Pemeriksa KI	
	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Pejabat Administrasi di lingkungan	

	<p>Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023</p>	
	<p>Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Gelombang II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023</p>	
	<p>Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023</p>	
	<p>Penilaian Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023</p>	
	<p>Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Gelombang III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023</p>	
	<p>Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023</p>	
	<p>Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Analis Hukum dan Pengangkatan Analis Hukum Melalui Perpindahan dari Jabatan</p>	

	Lain Serta Kenaikan Jenjang Penyuluh Hukum Tahun 2023	
	Penilaian Kompetensi Bagi Calon Jabfung Pengelola Keuangan APBN	
	Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pengisian Jabatan Pelaksana (Eselon V) Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	
Penilaian Preferensi Kompetensi Dengan Metode Online	Penilaian Preferensi Kompetensi CACT Kanwil	13.620
	Penilaian Potensi di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	
	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Kemenkumham (SJT)	
	Uji Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural bagi jabatan fungsional penyuluh hukum	
	Penilaian Kompetensi Perpindahan Jabatan Dari Instansi Luar Kemenkumham	
	Penilaian Kompetensi bagi Jabfung Analis Kekayaan Intelektual (SJT)	
Feedback Penilaian Kompetensi di Lingkungan Kemenkumham	Kanwil Sulawesi Utara	65
	Kanwil Sumatera Selatan	65
	Kanwil Kepulauan Riau	65
	Kanwil D.I. Yogyakarta	65

- **Evaluasi dan Laporan**

Evaluasi dan Laporan pada Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai anggaran sebesar Rp. 73.721.000,- yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	Kanwil Sulawesi Utara
	Kanwil Sumatera Selatan
	Kanwil Kepulauan Riau
	Kanwil D.I. Yogyakarta
Penyusunan Laporan	Penyusunan Laporan Monev Pemanfaatan hasil penilaian kompetensi
	Penyusunan Laporan Kinerja

- Penyelenggaraan Dukungan IT SDM

Evaluasi dan Laporan pada Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai anggaran sebesar Rp. 496,994,000,- yang yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Dukungan IT SDM	Tata Kelola Data Dan Informasi
	Workshop Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Sistem Dan Informasi
	Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi
	User Acceptance Test (UAT) Aplikasi Competency Management System (CMS)
	Digitalisasi Laporan CI Dan Q-Com Penilaian Kompetensi
	Evaluasi Teknis Sistem Informasi Manajemen Rumah Belajar Dan Jaringan Internet Tahun 2023

4. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Pada tahun 2023, anggaran sebesar Rp.

114.052.258.000,- untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

Layanan	Kegiatan	Anggaran
Layanan BMN	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan BMN Penatausahaan BMN Layanan Pengadaan BMN Asistensi Pengelolaan BMN Satker Badiklat 	Rp. 732.992.000,-
Layanan Hubungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Hubungan Pers dan Media Penyelesaian Tidak Lanjut Pengaduan Masyarakat Pameran Expo Publikasi dan Promosi Peliputan Kegiatan Penerbitan Berita Pelaksanaan Kerja Sama 	Rp. 487.725.000,-
Layanan Protokoler	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran Antar Kementerian/Lembaga Koordinasi Keprotokoleran Kementerian Pelaksanaan Keprotokoleran 	Rp. 112.274.000,-
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	<ol style="list-style-type: none"> Administrasi Kelembagaan Workshop Penyempurnaan SOP Restrukturisasi Kelembagaan Penggabungan Politeknik 	Rp. 1.001.352.000,-
Layanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> Layanan Urusan Kerumahtanggaan Keperluan Penunjang Pelaksanaan Tugas Fungsi Tim Asisten Pengadaan, 	Rp. 633.847.000,-

	Pemeriksaan, Penerimaan, dan Pemeliharaan Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi	
Layanan Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran Gaji Tunjangan2. Kendaraan Dinas Operasional3. Langganan Daya dan Jasa4. Pemeliharaan Gedung, Pagar dan Halaman5. Pemeliharaan Peralatan Perkantoran6. Belanja Keperluan Perkantoran7. SEWA8. Pengadaan Pakaian Dinas9. Jamuan Tamu10. Konsultasi/Koordinasi11. Pengelola Keuangan dan BMN12. Kesehatan Pegawai13. Penangan Covid	Rp. 56.824.904.000,-
Layanan Sarana Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi2. Kendaraan Bermotor3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Rp. 8.497.607.000,-
Layanan Prasarana Internal	Pembangunan gedung dan bangunan	Rp. 40.108.835.000,-
Layanan Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian (Adm Jabfung Pemberhentian dan Umum Mutasi Kepegawaian)2. Administrasi 15 Jabatan Fungsional di lingkungan BPSDM3. Pembinaan Mental, Fisik dan Penguatan Disiplin Pegawai4. Pengembangan Mandiri Pegawai	Rp. 429.308.000,-

	5. Penerbitan Jurnal BPSDM Hukum dan HAM	
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RKA-K/L TA 2024 2. Revisi RKA-K/L TA 2023 3. Supervisi Penyusunan RKA-K/L Balai Diklat TA 2024 4. Analisa Kebutuhan Anggaran TA 2025 5. Focus Group Discussion Penyusunan Kalender Kerja dan Skala Prioritas 2024 dan Analisa Kebutuhan Anggaran 2025 6. Workshop Kinerja Dukungan Manajemen di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023 7. Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Jasa Profesi 	Rp. 1.142.499.000,-
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi dan Monitoring Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 2. Penguatan dan Percepatan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 3. Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan 4. FGD Review Rencana Strategis Bpsdm Hukum Dan Ham 2020-2024 TA 2023 5. Workshop Penyusunan LKjIP TA 2023 6. Evaluasi Capaian Kinerja dan Penjaminan Mutu BPSDM Hukum dan HAM 7. Aplikasi E-Report Capaian Kinerja 8. Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM 9. Kegiatan Internalisasi Percepatan 	Rp. 3.101.893.000,-

	Tugas Dan Fungsi BPSDM Hukum dan HAM	
Layanan Manajemen Keuangan	1. Penatausahaan Anggaran Pelaksanaan 2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran 3. Rekonsiliasi BPSDM Hukum dan HAM 4. Penyusunan Laporan Keuangan 5. Tindak Lanjut Audit atas Laporan Keuangan	Rp. 446.000.000,-
Layanan Reformasi Kinerja	1. Administrasi Fasilitasi RB, SPIP, Pembangunan ZI, WBK, WBBM 2. Penyusunan Manajemen Resiko 3. Workshop Tunas Integritas BPSDM Hukum dan HAM 4. Penguatan dan Pendampingan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 5. Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Rp. 495.502.000,-
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1. Pengelolaan Arsip dan Persuratan 2. Pengelolaan Perpustakaan	Rp. 37.520.000,-

5. Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi bidang pemasarakatan. Pada Tahun 2023 Poltekio menganggarkan pagu sebesar Rp Rp. 43.660.237.000,- untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan bidang pemasarakatan.

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Politeknik Pemasarakatan sesuai dengan fungsinya

Layanan	Kegiatan	Anggaran
Layanan BMN	1. Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 2. Monitoring dan Evaluasi BMN 3. Layanan Umum, Rumah Tangga	Rp. 26,110,000,-

	dan Perlengkapan	
Layanan Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Belanja Uang Lembur 3. Kendaraan Dinas Operasional 4. Langganan Daya dan Jasa 5. Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 6. Keperluan Perkantoran 7. Pakaian Dinas 8. Pelantikan / Sumpah Jabatan 9. Koordinasi / Konsultasi 10. Honorarium Pengelola Keuangan 11. Kesehatan Pegawai 12. ATK dan Kebutuhan Lainnya 	Rp. 7.637.347.000,-
Layanan Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Kepegawaian 2. Akreditasi Kelembagaan 3. Kegiatan Penelitian Ilmiah 4. Wisuda 5. Pelaksanaan Senat Akademik 6. Penyusunan Buku Ajar 	Rp. 2,087,867,000,-
Pendidikan Taruna Tk I Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Orientasi Lapangan 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop 	Rp. 7.438.940.000,-
Pendidikan Taruna Tk II Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Praktek Kerja Lapangan 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop 	Rp. 7.441.302.000,-
Pendidikan Taruna Tk III Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kuliah Kerja Nyata 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop 	Rp. 7.348.393.000,-
Pendidikan Taruna Tk IIV Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Magang 3. Penyegaran Kesamaptaan dan Menembak 	7,622,699,000

4. Seminar/Sosialisasi/Workshop			
Masa Basis Calon Taruna Politeknik Ilmu Masyarakat	1. Kesamaptaan		Rp. 3.171.158.000,-
	2. Pelantikan		
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6. Penyusunan Program	Rencana	Rp. 3.460.000,-
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7. Benchmarking Taruna	Kebutuhan	Rp. 82.645.000,-
	8. Benchmarking		
	9. Rapat Evaluasi Pendidikan		
	10. Supervisi Alumni		
	11. Penyusunan Capaian Kinerja	Laporan	
Layanan Manajemen Keuangan	1. Pelaksanaan Anggaran		Rp. 42.116.000,-
	2. Akuntansi dan Pelaporan		

6. Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi bidang imigrasi. Pada Tahun 2023 Poltekim menganggarkan pagu sebesar Rp 42.255.699.000,- untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan bidang imigrasi.

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Politeknik Imigrasi sesuai dengan fungsinya

Layanan	Kegiatan	Anggaran
Layanan BMN	1. Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan BMN	Rp. 24.495.000,-
	2. Layanan Pengadaan BMN	
	3. Monitoring dan Evaluasi BMN	
	4. Layanan Urusan Kerumahtangaan	
	5. Layanan Kesehatan	
Layanan Perkantoran	1. Pembayaran gaji dan tunjangan	Rp. 8.475.237.000,-
	2. Belanja Uang Lembur	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kendaraan Dinas Operasional 4. Langganan Daya dan Jasa 5. Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 6. Keperluan Perkantoran 7. Pakaian Dinas 8. Pelantikan/Sumpah Jabatan 9. Koordinasi/Konsultasi 10. Honorarium Pengelola Keuangan 11. Pengiriman dan Pos 12. Kesehatan Pegawai 13. ATK dan Kebutuhan Lainnya 14. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 	
Layanan Sarana Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Pengolah data dan Komunikasi 2. Peralatan Fasilitas Perkantoran 	Rp. 257.320.000,-
Layanan Manajemen SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Kepegawaian 2. Akreditasi Kelembagaan 3. Kegiatan Penelitian Ilmiah 4. Wisuda 5. Pelaksanaan Senat Akademik 6. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM 	Rp. 1.725.109.000,-
Pendidikan Taruna Tk I Politeknik Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Orientasi Lapangan 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop/Kegiatan Sejenis 4. Pengabdian Masyarakat 	Rp. 6.778.501.000,-
Pendidikan Taruna Tk II Politeknik Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Praktek Kerja Lapangan 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop/Kegiatan Sejenis 4. Pengabdian Masyarakat 	Rp. 6.985.062.000,-
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 	Rp. 6.749.690.000,-

Taruna Tk III Politeknik Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kuliah Kerja Nyata 3. Seminar/Sosialisasi/Workshop/Kegiatan Sejenis 4. Pengabdian Masyarakat 	
Pendidikan Taruna Tk IV Politeknik Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kegiatan Magang 3. Penyegaraan Kesamaptaaan dan Menembak 4. Seminar/Sosialisasi/Workshop/Kegiatan Sejenis 5. Pengabdian Masyarakat 	Rp.6.830.463.000,-
Masa Basis Calon Taruna Politeknik Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesamaptaaan 2. Pembinaan Minat Bakat dan Tradisi Taruna 3. Pelantikan 	Rp. 2.978.486.000,-
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Program 	Rp. 7.350.000,-
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan 2. Benchmarking 3. Rapat Evaluasi Pendidikan 4. Supervisi Alumni 5. Kegiatan Monitoring Taruna PKL/KKN/Magang 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 	Rp. 877.048.000,-
Layanan Manajemen Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 2. Penyusunan Laporan Keuangan 	Rp. 13.100.000,-

7. Balai Diklat Hukum dan HAM

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM yang berada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan Hak Asasi

Manusia sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Berikut Anggaran dan wilayah kerja masing-masing Balai Diklat:

No.	Balai Diklat	Anggaran	Wilayah Kerja
1.	Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau	Rp. 8.910.874.000,-	Kantor Wilayah Kemenkumham: 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung
2.	Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	Rp. 14.287.752.000,-	Kantor Wilayah Kemenkumham: 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur
3.	Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Rp. 12.466.288.000,-	Kantor Wilayah Kemenkumham: 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat

Berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Balai Diklat sesuai dengan fungsinya:

a. Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau

No.	Fungsi	Anggaran
1.	Layanan BMN <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pengadaan BMN • Penatausahaan BMN 	Rp. 103.321.000,-

2.	Layanan Hubungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi dan Promosi 	Rp. 46.171.000,-
3.	Layanan Protokoler <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran 	Rp. 12.964.000,-
4.	Layanan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Urusan Kerumahtanggaan • Layanan Kesehatan 	Rp. 234.750.000,-
5.	Layanan Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran gaji dan tunjangan • Pemeliharaan Kendaraan Operasional • Langganan Daya Dan Jasa • Pemeliharaan Peralatan Perkantoran • Keperluan Perkantoran • Pakaian Dinas • Jamuan Tamu • Pelantikan / Sumpah Jabatan • Koordinasi Dan Konsultasi • Honor Pengelola Keuangan • Jasa dan Pos Giro • Pembelian Obat-obatan • Penanganan Covid-19 • Sewa Kendaraan dan Peralatan • Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman 	Rp. 32.340.000,-
6.	Layanan Manajemen SDM <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Kepegawaian • Pengembangan Mandiri Pegawai • Workshop Penguatan Integritas Pegawai Dalam Rangka • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 	Rp. 256.503.000,-
7.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pengembangan Kompetensi • Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi • Penyusunan Laporan dan Evaluasi 	Rp. 3.584.262.000,-
8.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran • Revisi Anggaran 	Rp. 342.006.000,-
9.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 	Rp. 108,883,000,-
10.	Layanan Manajemen Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran • Akuntansi dan Pelaporan 	Rp. 126.488.000,-
11.	Layanan Reformasi Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Pencanaan Zona Integritas 	Rp. 19.972.000,-

<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Satker WBK/WBBM • Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi 	
--	--

Sebagaimana tugas utama Balai Diklat adalah menyelenggarakan pelatihan di wilayah, berikut rencana pelatihan Balai Diklat Kep. Riau tahun 2023:

No	Pelatihan	Metode	Target
1	Pelatihan Kesamaptaan	Klasikal	80
2	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomas	PJJ	149
3	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara	Klasikal	40
4	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	PJJ	80
5	Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan (Klasikal)	Klasikal	70
6	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	Blended	90
7	MOOC		-
8	Pelatihan Protokoler	Klasikal	60
9	Webinar		-
10	Pelatihan Teknis Pemasarakatan Pemeriksaan Pelanggaran Tata Tertib (PJJ)	PJJ	40
11	Sosialisasi PK Bangkom	Klasikal	-
12	Workshop Manajemen Krisis	Klasikal	50
Total			659

b. Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

No.	Fungsi	Anggaran
1.	Layanan BMN <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pengadaan BMN • Penatausahaan BMN 	Rp. 47.192.000,-
2.	Layanan Hubungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi dan Promosi 	Rp. 16.080.000 ,-
12.	Layanan Protokoler <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran 	Rp. 58.500.000 ,-
13.	Layanan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Urusan Kerumahtanggaan • Layanan Kesehatan 	Rp. 418.938.000 ,-

14.	Layanan Perkantoran <ul style="list-style-type: none">• Pembayaran gaji dan tunjangan• Uang Lembur• Pemeliharaan Kendaraan Operasional• Layanan Daya dan Jasa• Pemeliharaan Gedung Kantor, Pagar dan Halaman• Pemeliharaan Peralatan Kantor• Keperluan Perkantoran• Pakaian Dinas• Jamuan Tamu• Pelantikan/Sumpah Jabatan• Koordinasi dan Konsultasi• Honor Pengelola Keuangan• Pengiriman dan Pos• Pembelian Obat-Obatan• Penanganan Covid• Sewa Kendaraan dan Peralatan	Rp. 4.083.505.000,-
15.	Layanan Sarana Internal <ul style="list-style-type: none">• Kendaraan Bermotor• Perangkat Pengolah data dan Komunikasi• Peralatan Fasilitas Perkantoran	Rp. 698.972.000,-
16.	Layanan Prasarana Internal <ul style="list-style-type: none">• Gedung dan Bangunan	Rp. 5.186.635.000,-
17.	Layanan Manajemen SDM <ul style="list-style-type: none">• Administrasi Kepegawaian• Pengembangan Mandiri Pegawai• Pembinaan Mental, Fisik dan Penguatan Disiplin Pegawai	Rp. 319.008.000,-
18.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan Pengembangan Kompetensi• Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi• Penyusunan Laporan dan Evaluasi	Rp. 3.128.201.000,-
19.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran• Revisi Anggaran	Rp. 42.499.000 ,-
20.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	Rp. 109.876.000 ,-
21.	Layanan Manajemen Keuangan <ul style="list-style-type: none">• Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran• Penyusunan Laporan Keuangan	Rp. 120.256.000 ,-

22.	Layanan Reformasi Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Pembangunan ZI dan Pengelolaan SPIP • Pembentukan Satker WBK/WBBM • Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi 	Rp. 49.590.000,-
23.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Arsip dan Persuratan • Pengelolaan Perpustakaan 	Rp. 8.500.000,-

Sebagaimana tugas utama Balai Diklat adalah menyelenggarakan pelatihan di wilayah, berikut rencana pelatihan Balai Diklat Jawa Tengah tahun 2023:

No	Pelatihan	Metode	Target
1.	Pelatihan Protokoler	Klasikal	40
2.	Pelatihan Teknis Pelayanan Pengaduan dan Sidang Kode Etik	PJJ	40
3.	Pelatihan Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	Klasikal	80
4.	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	PJJ	40
5.	Pelatihan Tata Kelola Teknologi Informasi Keimigrasian	Klasikal	40
6.	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Level 1	Blended Learning	40
7.	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	Blended Learning	40
8.	Pelatihan Strategi dan Teknik Membangun Publikasi Pelayanan	PJJ	40
9.	Pelatihan Status Keimigrasian	PJJ	40
10.	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk Dasar	E-learning	-
11.	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk Dasar	E-learning	-
12.	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk Dasar	E-learning	-

13.	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan	Klasikal	40
14.	Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI	Klasikal	40
15.	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomas	PJJ	40
16.	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian	Klasikal	40
17.	Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasarakatan (Kesamaptaan)	Klasikal	40
18.	Pelatihan RB	MOOC	-
19.	Pelatihan MTSL	E-learning	-
20.	Webinar / Community of Practice / Sosialisasi / Bimtek / Workshop		1.200
Total			1.800

c. Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

No.	Fungsi	Anggaran
1.	Layanan BMN <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Pengadaan BMN • Penatausahaan BMN 	Rp. 7.730.000,-
2.	Layanan Hubungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi dan Promosi 	Rp. 12.500.000,-
3.	Layanan Protokoler <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran 	Rp. 87.262.000,-
4.	Layanan Umum <ul style="list-style-type: none"> • Layanan Urusan Kerumahtanggaan • Layanan Kesehatan 	Rp. 112.181.000,-
5.	Layanan Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran gaji dan tunjangan • Uang Lembur • Pemeliharaan Kendaraan Operasional • Layanan Daya dan Jasa • Pemeliharaan Gedung Kantor, Pagar dan Halaman • Pemeliharaan Peralatan Kantor • Keperluan Perkantoran • Pakaian Dinas • Jamuan Tamu • Pelantikan/Sumpah Jabatan 	Rp. 2.606.590.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Konsultasi • Honor Pengelola Keuangan • Pengiriman dan Pos • Penanganan Covid • Sewa Kendaraan • Biaya Komunikasi 	
6.	Layanan Sarana Internal <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan Bermotor • Perangkat Pengolah data dan Komunikasi • Peralatan Fasilitas Perkantoran 	Rp. 1.500.080.000,-
7.	Layanan Prasarana Internal <ul style="list-style-type: none"> • Gedung dan Bangunan 	Rp. 1.535.200.000,-
8.	Layanan Manajemen SDM <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Kepegawaian • Pengembangan Mandiri Pegawai • Bimtek Kearsipan • Bimtek Kepegawaian • Workshop Public speaking dan jurnalis • Pembinaan Mental, Fisik dan Penguatan Disiplin Pegawai 	Rp. 458.408.000,-
9.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Pengembangan Kompetensi • Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi • Penyusunan Laporan dan Evaluasi 	Rp. 5.541.538.000,-
10.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran • Revisi Anggaran 	Rp. 263.472.000,-
11.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 	Rp. 104.946.000,-
12.	Layanan Manajemen Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran • Penyusunan Laporan Keuangan 	Rp. 93.452.000,-
13.	Layanan Reformasi Kinerja <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Satker WBK/WBBM 	Rp. 136.700.000,-
14.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Arsip dan Persuratan • Pengelolaan Perpustakaan 	Rp. 6.229.000,-

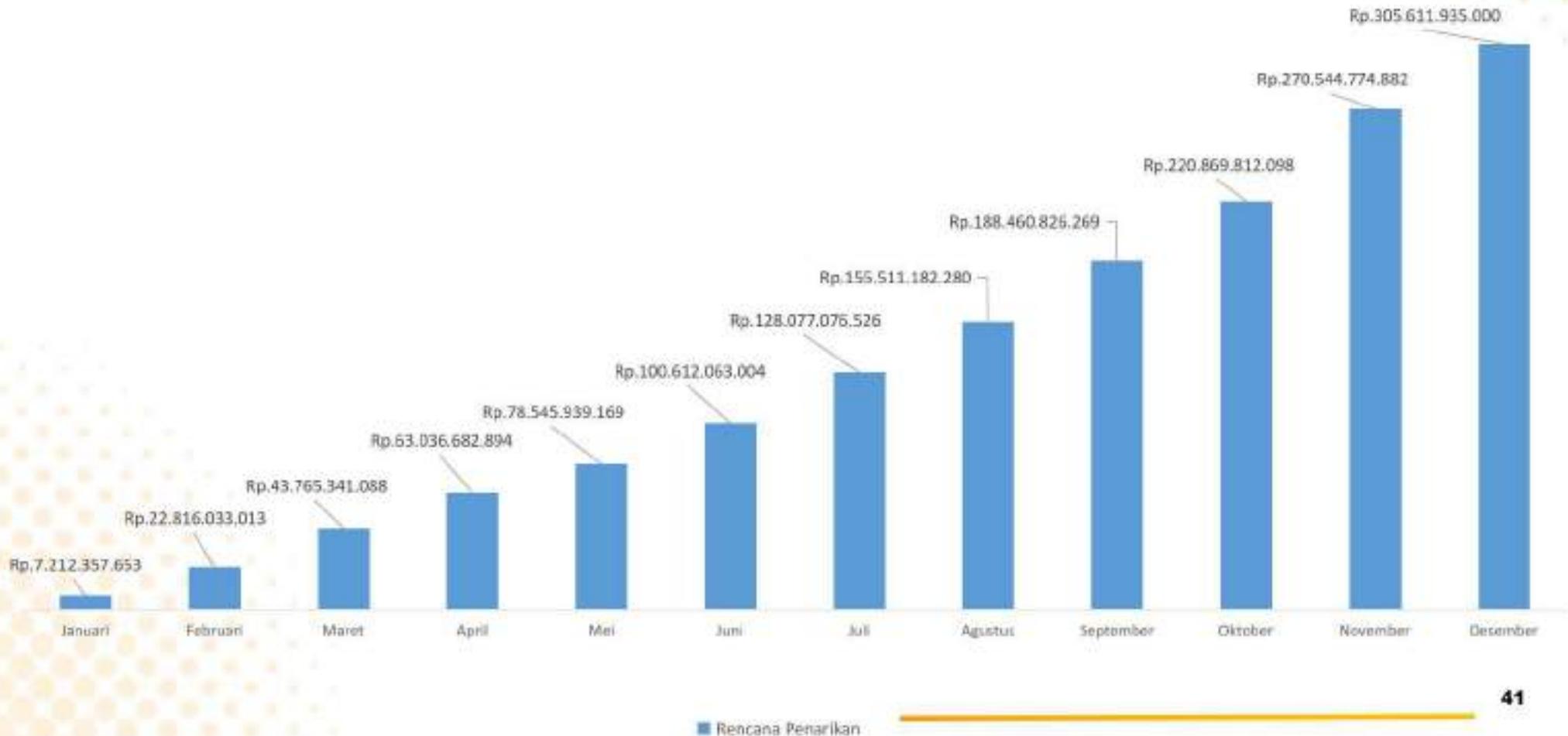
Sebagaimana tugas utama Balai Diklat adalah menyelenggarakan pelatihan di wilayah, berikut rencana pelatihan Balai Diklat Sulawesi Utara tahun 2023:

No	Pelatihan	Metode	Target
1	Pelatihan Protokoler	Klasikal	30
2	Pelatihan Teknis Pelayanan Pengaduan dan Sidang Kode Etik Metode Pelatihan Jarak Jauh	PJJ	160
3	Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	Klasikal	40
4	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	Klasikal	40
5	Pelatihan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi	Klasikal	80
6	Pelatihan Strategi dan Teknik Membangun Publikasi Pelayanan	PJJ	80
7	Pelatihan Satus Keimigrasian	PJJ	74
8	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	E-learning	80
9	Pelatihan Dasar-Dasar HAM	MOOC	80
10	Pelatihan Basic Trauma Cardiac Live Support (BTCLS)	Blended	75
11	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	80
12	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomas	Klasikal	60
13	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian	Klasikal	40
14	Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasarakatan (Kesamaptaan)	Klasikal	40
15	Community Of Practice		480
16	Pelatihan Reformasi Birokrasi	E-learning	1.000
17	Pelatihan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	E-learning	1.000
18	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan	Klasikal	80

19	Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasyarakatan (Kesamaptaan) Kerjasama dengan Rindam	Klasikal	40
Total			3.559

C. Rencana Penyerapan Anggaran

Berikut rencana penyerapan anggaran (*Disbursement plan*) BPSDM Hukum dan HAM





BAB III PELAKSANAAN KINERJA

LAPORAN TAHUNAN
BPSDM HUKUM DAN HAM

TAHUN 2023

BAB III PELAKSANAAN KINERJA

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang manifestasi dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan serta dapat di pertanggungjawabkan, yang meliputi pencapaian target dan implementasi kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM disertai dengan permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2023.

A. Capaian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM

Pada tahun anggaran 2023, BPSDM Hukum dan HAM sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pelatihan baik pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan maupun pelatihan fungsional dan HAM dengan output pelatihan sebanyak **141.099** aparatur di bidang Hukum dan HAM melalui berbagai metode pembelajaran yaitu klasikal (tatap muka langsung), pembelajaran jarak jauh (PJJ), MOOC (*Massive Open Online Course*), Webinar dan *e-learning*. Selain melakukan kegiatan pengembangan pegawai, BPSDM Hukum dan HAM juga melakukan penilaian dan pemetaan kompetensi kepada **15.931** pegawai.

Disamping menyelenggarakan pengembangan pegawai bagi aparatur di bidang hukum dan hak asasi manusia, BPSDM Hukum dan HAM juga menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang mencetak SDM yang memiliki kompetensi di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Melalui Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan Pendidikan Kedinasan yang mencetak SDM yang memiliki kompetensi di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan. Jumlah taruna saat ini yang sedang mengikuti pendidikan kedinasan sebanyak adalah 2.520 taruna dengan 1.319 orang merupakan taruna Poltekip dan 1.201 orang merupakan taruna Poltekim.

Tabel Capaian Output Kegiatan

No	Satuan Kerja	Bentuk Kegiatan			Total
		Pelatihan Klasikal	Pelatihan Non-Klasikal	Penkom Pendidikan	
1	Pusbanglat Tekpim	4.106	47.583	-	51.689
2	Pusbanglat Fungham	1.130	65.523	-	66.653
3	Puspenkom	-	-	15.925	15.925
4	Poltekip	-	-	-	1.319

5	Poltekim	-	--	-	1.201	1.201
6	Badiklat Sulut	2.540	1.710	-	-	4.250
7	Badiklat Jateng	4.424	8.720	-	-	13.144
8	Badiklat Kepri	622	4.741	-	-	5.363
Total		12.822	128.277	15.925	2.520	159.544

Dari sisi anggaran pada awal tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM menerima Angara sebesar Rp. 250.160.624.000,-,- untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memenuhi capaian kinerja yang telah ditentukan. Namun, dalam waktu berjalan BPSDM Hukum dan HAM mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), pembangunan sarana dan perlengkapan olahraga lapangan tenis, penambahan anggaran listrik dan PDAM serta renovasi ruang rapat sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar **Rp.305.611.935.000,-**. Sampai dengan akhir tahun 2023, BPSDM Hukum dan HAM telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 298.183.938.444,- (97,57%)**. Berikut data penyerapan BPSDM Hukum dan HAM per kegiatan sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian kegiatan dalam rangka pemenuhan capaian sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM.

Berikut tabel realisasi anggaran per belanja dan realisasi anggaran tahun 2023 pada masing-masing satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM :

Tabel Realisasi Anggaran Per Belanja

Akun Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	34.843.245.000,-	34.335.411.219,-	98,54
Belanja Barang	213.385.164.000,-	206.691.687.140,-	96,86
Belanja Modal	57.383.526.000,-	57.156.840.085,-	99,6

Sumber : SMART Ditjen Anggaran

**Grafik Realisasi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja
BPSDM Hukum dan HAM**



Berikut capaian kinerja pada satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM tahun anggaran 2023:

1. Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan fungsional dan HAM. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka perlu diselenggarakan fungsi Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Pelaporan pelatihan fungsional dan HAM. Berikut rincian capaian kinerja dan kegiatan pada masing-masing fungsi tersebut:

Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pelatihan Fungsional dan HAM pada Tahun 2023 melaksanakan beberapa kegiatan penyusunan kurikulum dan modul, serta workshop. Berikut rincian kegiatan perencanaan pelatihan Fungsional dan HAM:

Kegiatan	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Penyusunan Rencana dan Program Pelatihan Fungsional dan HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.121.994.000	3.056.153.158
2. Penyusunan Modul Penjenjangan Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Muda	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
3. Sosialisasi Massive Open Online Course (MOOC) pada Kantor Wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
4. Penyusunan Modul Penjenjangan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
5. Workshop Writing Camp untuk Pejabat Fungsional dilingkungan BPSDM Hukum dan HAM	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
6. Penguatan Simulasi Ice Breaking dan Dinamika Kelompok bagi Penyelenggara Pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
7. Konsolidasi Pelatihan Fungsional pada 3 (tiga) Balai Diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
8. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
9. Reviu Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum	19 Modul	19 Modul		
10. Worskhop Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Hukum	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
11. Perencanaan Pelatihan Pembimbing Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
12. Penyusunan Kurikulum Pelatihan Pembimbing Masyarakat Muda	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
13. Penyusunan Modul Penjenjangan Pelatihan Pembimbing Masyarakat Muda	14 Modul	14 Modul		
14. Reviu Penyusunan Kurikulum Pelatihan Fungsional Pembimbing Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	100%		98%	

Berdasarkan tabel diatas, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional telah melaksanakan 14 kegiatan perencanaan pelatihan pada tahun 2023 yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga realisasi kegiatan perencanaan pelatihan mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi kegiatan perencanaan pelatihan mencapai 98% atau sebesar Rp.3.056.153.158,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp.3.121.994.000,-.

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia juga telah melaksanakan tugas penyelenggaraan pengembangan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia pada tahun 2023. Berikut capaian pelaksanaan kegiatan pelatihan pada tahun 2023:

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target (RKAKL)	Realisasi	Target	Realisasi
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM	15 Pelatihan	15 Pelatihan	3.185.086.000	2.836.576.101
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM	21.916 Orang	66.341 Orang		
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	8 Pelatihan	8 Pelatihan	2.536.744.000	2.309.691.633
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	320 Orang	312 Orang		
Total	22.236 Orang	66.653 Orang	5.721.830.000	5.146.267.734
Persentase Capaian (%)	333,6		90	

Berikut rincian dan waktu pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM tahun anggaran 2023:

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Fungsional dan HAM				
1	Analisis Hukum	Mei - November	150	5 Angkatan/ PJJ
2	Analisis Kebijakan	11 Oktober - 2 November	6	2 Angkatan/PJJ
3	Arsiparis	29 Maret - 7 Juni	14	1 Angkatan/PJJ
4	Pemeriksa Keimigrasian	Februari - November	320	8 Angkatan/PJJ

5	Pengelola Barjas	Agustus - September	54	2 Angkatan/PJJ
6	Penjenjangan Auditor	Juli - Agustus	15	2 Angkatan/ <i>Blended</i>
7	Penjenjangan Auditor	21 Agustus- 14 September	1	1 Angkatan/ <i>Blended</i>
8	Penjenjangan Pengelola Barjas	7 September - 22 Desember	30	1 Angkatan/PJJ
9	Penyuluh Hukum	Mei - Agustus	60	2 Angkatan/ Klasikal
10	Penyuluh Hukum	4 Juli - 8 Agustus	30	1 Angkatan/ Klasikal
11	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Februari - November	75	3 Angkatan/PJJ & Klasikal
12	<i>Training of Trainer</i> Analisis Hukum	1-7 Februari	30	1 Angkatan/ Klasikal
13	<i>Training of Trainer</i> Pengaman Pemasyarakatan	8-14 Februari	30	1 Angkatan/ Klasikal
14	Massive Open Online Course (MOOC) Pemasyarakatan	Maret - 31 Oktober	44.233	4 Angkatan/ MOOC
16	Massive Open Online Course (MOOC) HDKD	Agustus - 31 Oktober	21.290	1 Angkatan/ MOOC
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan				
17	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	8-14 Februari	29	<i>Blended</i>
18	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 51	20 Maret - 16 Juni 2023	40	<i>Blended</i>
19	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 52	02 Mei - 18 Juli 2023	40	<i>Blended</i>
20	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 53	24 Juli - 06 Oktober 2023	41	<i>Blended</i>
21	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 54	18 September - 29 November 2023	44	<i>Blended</i>

22	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.I	17 Juli-5 September	38	<i>Blended</i>
23	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.II	21 Agustus -10 Oktober	40	<i>Blended</i>
24	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.III	11 Oktober - 29 November	40	<i>Blended</i>
Total			66.653 orang	

2. Pusat Penilaian Kompetensi

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2023, Pusat Penilaian Kompetensi telah menyelenggarakan fungsi Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Dukungan Sistem Informasi BPSDM Hukum dan HAM. Berikut rincian pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut.

Penilaian Kompetensi pada tahun 2023 melaksanakan beberapa kegiatan perencanaan dan evaluasi penilaian kompetensi. Kegiatan perencanaan dan evaluasi penilaian kompetensi secara rinci antara lain:

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyusunan Rencana Program Penilaian Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.290.652.000	1.266.229.107
Penyusunan Desain Simulasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Sub Indikator Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Level IV	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Penyusunan Pedoman Penyampaian Feedback dan Laporan Hasil Penilaian Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
WORKSHOP PENGEMBANGAN ASESOR DALAM SIMULASI BUSINESS GAMES	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	100		98	

Berdasarkan tabel diatas, Bidang Program telah melaksanakan 6 kegiatan pada Tahun 2023 yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan

seluruhnya sehingga realisasi kegiatan perencanaan penilaian kompetensi mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi Bidang Program mencapai 98% atau sebesar Rp.1.266.229.107,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp. 1.290.652.000,-.

Dari sisi fungsi penyelenggaraan penilaian kompetensi, pada tahun 2023 Pusat Penilaian Kompetensi telah melaksanakan uji kompetensi kepada 15.925 Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 14.520 orang. Adapun realisasi penyerapan anggaran penyelenggaraan penilaian kompetensi pada tahun 2023 sebesar 99% atau Rp.2.118.448.652,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar Rp.2.130.654.000,-. Berikut rincian capaian pelaksanaan penilaian kompetensi pada tahun anggaran 2023:

Kegiatan	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	500 Orang	495 Orang	2.130.654.000	2.118.448.652
Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	400 Orang	1.613 Orang		
Penilaian Preferensi Kompetensi dengan Metode Online	13.620 Orang	13.817 Orang		
Total	14.520 Orang	15.925 Orang		
Persentase Capaian (%)	110		99	

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Target	Output	Alat Ukur
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					
1.	Kantor Wilayah D.I . Yogyakarta	27 Februari – 3 Maret 2023	60	59	Tes Potensi, WawancaraManajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
2.	Kantor Wilayah MalukuUtara	27 Februari – 3 Maret 2023	60	60	Tes Potensi, WawancaraManajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
3.	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	8-12 Mei 2023	60	60	Tes Potensi, WawancaraManajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi
4.	Kantor Wilayah Gorontalo	22 Mei – 26 Mei 023			Tes Potensi, WawancaraManajerial

			60	60	dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
5.	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	12-16 Juni 2023	60	60	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
6.	Kantor Wilayah Jambi	19-23 Juni 2023	60	60	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
7.	Kantor Wilayah Papua	19-23 Juni 2023	60	60	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
8.	Uji Kompetensi dan Potensi Pengangkatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	28 Februari – 01 Maret 2023		15	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
9.	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	07 – 14 Maret 2023	80	49	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
10.	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemetaan Kompetensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	14 – 17 Maret 2023		12	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					
11.	Penilaian Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain	14 – 16 Februari 2023		17	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi
12.	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal	07 – 14 Maret 2023		37	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD

	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023		400		
13.	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemetaan Kompetensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi (Bandung & BPSDM)	14 – 17 Maret 2023		153	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
14.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	03 – 11 April 2023		207	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
15.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan JF Perancang Perundang-undangan	29 – 31 Mei 2023		115	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD, Proposal Writing
16.	Penilaian Kompetensi Jabatan Analis Hukum (perpindahan jabatan)	13-14 Juni 2023		83	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD, CBT Teknis
17.	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Pemeriksa KI	25 – 28 Juli 2023		62	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi, LGD
18.	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023	29 Agustus – 1 September 2023		168	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
19.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang				Tes Potensi,

	bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Gelombang II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023	11 – 15 September 2023		214	Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
20.	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	7 – 8 September 2023		3	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi, LGD
21.	Penilaian Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	20-21 September 2023		18	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, Presentasi
22.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Gelombang III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023	31 Okt – 3 November 2023		224	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
23.	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	8 – 10 November 2023		206	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD, Presentasi dan In Tray

	Tahun 2023				
24.	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Analis Hukum dan Pengangkatan Analis Hukum Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Serta Kenaikan Jenjang Penyuluh Hukum Tahun 2023	22 - 24 November 2023		60	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus/Presentasi Teknis, LGD, CBT Teknis
25.	Penilaian Kompetensi Bagi Calon Jabfung Pengelola Keuangan APBN	15 November 2023		10	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus, LGD
26.	Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pengisian Jabatan Pelaksana (Eselon V) Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	22 - 24 November 2023		36	Tes Potensi, Wawancara Manajerial dan Sosial Kultural, Analisa Kasus
Penilaian Preferensi Kompetensi dengan Metode Online					
27.	Penilaian Preferensi Kompetensi CACT Kanwil	Juni - September 2023	13.620	13437	
28.	Penilaian Potensi di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	19 Mei 2023		74	Situational Judgement Test Online
29.	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Kemenkumham (SJT)	7 Juni 2023		31	Situational Judgement Test Online
30.	Uji Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural bagi jabatan fungsional Penyuluh Hukum	1 Agustus 2023		41	Situational Judgement Test Online
31.	Penilaian Kompetensi Perpindahan Jabatan Dari Instansi Luar Kemenkumham	1 Agustus 2023		37	Situational Judgement Test Online
32.	Penilaian	22			

Kompetensi bagi Jabfung Analis Kekayaan Intelektual (SJT)	November2023		197	Situational Judgement Test Online
Total		14.520	15.925	

Selain menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Penilaian Kompetensi juga menyelenggarakan dukungan sistem informasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Berikut capaian kegiatan pada pelaksanaan fungsi dukungan sistem informasi pada Pusat Penilaian Kompetensi:

Kegiatan	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Tata kelola data dan informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	496.994.000	492.422.091
2. Workshop Peningkatan Kapasitas Bagi Pengelola Sistem Informasi Dalam Pengelolaan Sistem dan Informasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
3. Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
4. User Acceptance Test (UAT) aplikasi Competency Management System (CMS)	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
5. Digitalisasi Laporan CI dan Q-Com Penilaian Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
6. Evaluasi Teknis Sistem Informasi Manajemen Rumah Belajar Dan Jaringan Internet Tahun 2023	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
7. Penyusunan Standar Data dan Rekonsiliasi Data Pengembangan dan Penilaian Kompetensi Tahun 2023	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	100		99	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang Sistem Informasi dan jaringan pada tahun 2023 melaksanakan 7 kegiatan yang menjadi target pada Bidang Sistem dan Informasi yang telah ditetapkan sehingga dari data tersebut diperoleh hasil capaian kinerja Bidang Sistem Informasi dan Jaringan sebesar 100%. Adapun realisasi penyerapan anggaran Bidang Sistem Informasi dan Jaringan pada tahun 2023 sebesar

99% atau Rp.492.422.091,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM hukum dan HAM sebesar Rp.496.994.000,-.

3. Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan teknis dan kepemimpinan bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi fungsinya yaitu perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaporan pelatihan teknis dan kepemimpinan. Berikut rincian capaian kinerja dan kegiatan pada masing-masing fungsi tersebut.

Berdasarkan hasil pemantauan kinerja tahun 2023, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan telah menyelenggarakan fungsi perencanaan pelatihan teknis dan kepemimpinan yang diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Penyiapan Dokumen Rencana Kegiatan Dan Kebijakan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.585.478.000	2.465.228.649
2. Penyusunan Pedoman Massive Open Online Course (MOOC) Pelatihan Teknis Pemasarakatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
3. Review dan Penyempurnaan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS (Penyusunan Panduan Aktualisasi, PKBT, dan Habitiasi Latsar CPNS)	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
4. Fgd Review RBPP, RBPMP dan Pedoman Pelatihan Teknis Pemasarakatan Metode E-Learning	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
5. Monitoring Persiapan dan Pelaksanaan PKA & PKP Kerjasama Lemdik	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
6. FGD Penyusunan RBPP, RBPMP, Pedoman Pelatihan Teknis Unit Eselon I Direktorat Jendral Imigrasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
7. Penyusunan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
Persentase Capaian (%)	100		95	

Berdasarkan tabel diatas, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan telah melaksanakan 7 kegiatan perencanaan pelatihan teknis dan kepemimpinan yang berarti bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga realisasi kegiatan Bidang Program mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi Bidang Program mencapai 95% atau sebesar Rp.2.465.228.649,- dari yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp.2.585.478.000,-.

Dari fungsi penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan Pusat Pengembang Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan pada Tahun 2023 menyelenggarakan diklat sebanyak 47 pelatihan dengan menggunakan Anggaran DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun PNPB dari Unit Eselon I lainnya. Penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan menggunakan metode klasikal, metode *e-learning* maupun dengan metode *Massive Open Online Course* (MOOC) tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga hasil capaian kinerja Bidang Penyelenggaraan di Tahun 2023 mencapai 99% yang berasal dari 35 pelatihan di Bidang Teknis dan Kepemimpinan, 9 pelatihan di Bidang SPPA serta 3 pelatihan dengan DIPA dari Ditjen Imigrasi dengan jumlah lulusan diklat sebanyak 51.689 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- 51.182 orang telah lulus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di bidang Teknis dan Kepemimpinan;
- 267 orang telah lulus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Aparat Penegak Hukum
- 240 orang telah lulus mengikuti pelatihan dengan anggaran DIPA Ditjen Imigrasi

Adapun realisasi penyerapan anggaran penyelenggaraan pelatihan pada Tahun 2023 sebesar 96% atau Rp.50.723.805.583,- dari yang dianggarkan dalam DIPA BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023 sebesar Rp.52.570.150.000,-. Informasi lebih lengkap tentang capaian output pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Indikator	Kinerja		Anggaran (Rp)	
	Target (RKAKL)	Realisasi	Target	Realisasi
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	35 Pelatihan	35 Pelatihan	49.641.460.000	48.109.983.483
Jumlah Lulusan Diklat di Bidang Teknis dan Kepemimpinan	50.769 Orang	51.182 Orang		
Penyelenggaraan Diklat di Bidang SPPA	9 Pelatihan	9 Pelatihan	2.928.690.000	2.613.822.100

Jumlah Lulusan Diklat di Bidang SPPA	270 Orang	267 Orang		
Penyelenggaraan Pelatihan PNBP Imigrasi	3 Pelatihan	3 Pelatihan	-	-
Jumlah lulusan pelatihan PNBP Imigrasi	240 orang	240 orang	-	-
Total	51.279 Orang	51.689 Orang	52.570.150.000	50.723.805.583
Persentase Capaian (%)	100,7		96	

No	Nama Pelatihan	Waktu Pelaksanaan	Output	Keterangan
Penyelenggaraan Diklat di Bidang Teknis dan Kepemimpinan				
1	Pelatihan Dasar CPNS bagi alumni Poltekop dan Poltekim	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Maret - 17 Juli • 4 Juli - 1 November 	587	<i>Blended Learning</i>
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	<ul style="list-style-type: none"> • 5 April - 24 Agustus • 30 Mei - 6 Oktober 	79	<i>Blended Learning</i>
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	<ul style="list-style-type: none"> • 19 Februari - 23 Juni • 10 Maret - 14 Juli • 27 April - 1 September 	119	<i>Blended Learning</i>
4	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif	6 - 10 Maret	26	Klasikal
5	Pendidikan Khusus Keimigrasian Bagi Lulusan Program D-IV (Diploma-Empat) Politeknik Imigrasi	8 - 22 Mei	247	Klasikal
6	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)	27 - 31 Maret	30	
7	Pelatihan Petugas Pengamanan	7 - 14 Juli	40	PJJ
8	Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • 6 - 9 Februari • 13 - 16 Februari • 20 - 23 Februari • 27 Februari - 2 Maret 	159	PJJ
9	Pendidikan Khusus Keimigrasian Bagi Pimti Madya	22 - 23 Februari	1	Klasikal
10	Pelatihan Asesmen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • 24 July - 10 Agustus • 7 - 25 Agustus • 28 Agustus - 14 September • 11 - 29 September • 2 - 19 Oktober 	189	
11	Pelatihan Teknologi Informasi	6 - 10 Februari	26	

12	Pelatihan Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan K/L	11 - 16 September	9	
13	<i>Massive Open Online Course (MOOC) Best Practice</i> Keimigrasian	Januari	17.140	
14	Pelatihan Pemeriksa Pelanggaran Tata Tertib	21 Juli - 4 Agustus	40	PJJ
15	Pelatihan Pengadministrasian Dan Perlengkapan Keamanan	25 Agustus - 8 September	37	PJJ
16	MOOC Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • 20 - 26 Februari • 2 - 8 Maret • 3 - 19 Maret • 23 - 29 Maret 	18.483	
17	MOOC Muatan Teknis Substansi Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • 15 Mei - 30 Juni • 14 - 28 September 	587	
18	Digital Learning	8 Maret	31	
19	LATSAR - LAN (Kerjasama LAN)	Juli - Oktober	20	
20	Pelatihan Refleksi Dan Aktualisasi Integritas (Prestasi)	16 - 20 Oktober	40	
21	MOOC Pendaftaran Merek	Agustus	790	MOOC
22	MOOC Penyelenggaraan Pengawasan		1.945	MOOC
23	MOOC Perseroan Perorangan		540	MOOC
24	MOOC SIPKUMHAM		648	MOOC
25	MOOC tentang Imigrasi		3.337	MOOC
26	MOOC Manajemen Resiko		3.678	MOOC
27	Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (Pelopor)	2 - 9 November	40	
28	MOOC Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	23 November - 9 Desember	220	MOOC
29	MOOC Pelayanan Publik Tk. Dasar	23 November - 9 Desember	215	MOOC
30	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	13 Juni - 29 November	13	
31	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - LAN	Juni - Desember	1.596	

32	Pelatihan Kepemimpinan Administrator - LAN	Juni - Desember	140	
33	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 205 (BPSDM Hukum dan HAM)	21 Agustus - 14 Desember	40	
34	Pelatihan Fasilitator Daring	12 - 15 Desember	30	
35	<i>Impactful Communication Skills Offline Training</i>	13 - 15 Desember	60	
Penyelenggaraan Diklat di Bidang SPPA				
36	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan I	2 - 16 Februari	30	Klasikal
37	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan II	22 Februari - 8 Maret	29	Klasikal
38	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan III	3 - 17 Mei	30	Klasikal
39	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan IV	7 - 21 Juni	30	Klasikal
40	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan V	14 - 28 Juni	30	Klasikal
41	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VI	26 Juli - 9 Agustus	30	Klasikal
42	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VII	23 Agustus - 6 September	28	Klasikal
43	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan VIII	13 - 27 September	30	Klasikal
44	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan IX	4 - 18 Oktober	30	Klasikal
Penyelenggaraan Pelatihan PNBP Direktorat Jenderal Imigrasi				
45	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS	Februari Agustus	120	Klasikal (4 Angkatan)
46	Pelatihan Intelegen Dasar Direktorat Jenderal Imigrasi	20 Juni - 18 Juli 2023	60	
47	Pendidikan Dan Pelatihan Pengamanan Deteni Direktorat Jenderal Imigrasi	17 Juli - 15 Agustus 2023	60	
Total			51.689	

4. Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM

Capaian Kegiatan

Capaian kegiatan bagian Sekretariat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Realisasi Kegiatan Sekretariat

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya dukungan administrasi dan fasilitatif di lingkungan BPSDM				
No	Bagian	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Program dan Pelaporan	Penyusunan RKA-K/L Tahun 2024	Terlaksananya supervisi penyusunan RKA-K/L Tahun 2024	1 Dokumen
		Revisi RKAKL Tahun 2023	- Revisi DIPA : 7 Kali - Reivisi POK : 14 Kali	21 Dokumen
		Supervisi Penyusunan RKAKL Badiklat	Supervisi Penyusunan RKAKL Badiklat Jateng : 2 kali Badiklat sulut 2 kali Badiklat Kepri 2 Kali	6 Dokumen
		Analisa Kebutuhan Anggaran 2025	Tersusunnya dokumen Analisis Kebutuhan Anggaran BPSDM 2025	1 Dokumen
		Focus Group Discussion Penyusunan Kalender Kerja dan Skala Prioritas 2024	Terlaksananya FGD Penyusunan Kalender Kerja dan Skala Prioritas 2024 tanggal 3 s.d 5 Desember 2023 di Hotel Gran Melia Jakarta	1 Dokumen
		Workshop Kinerja Dukungan Manajemen Supervisi Dan Monitoring Kinerja Bpsdm Hukum Dan HAM	Terlaksananya Workshop Kinerja Dukungan Manajemen tanggal 27 Feb s.d 1 Maret di Hotel Le Eminence Cianjur Terlaksananya Supervisi dan monitoring Kinerja BPSDM Hukum dan HAM	1 Dokumen 11 Dokumen
		Penguatan dan Percepatan kinerja BPSDM Hukum dan HAM	Terlaksananya Penguatan dan Percepatan kinerja pada Kanwil Kemenkumham Jawa Timur tanggal 27 s.d 30 Agustus 2023,yaitu: 1. Supervisi Target Kinerja BPSDM pada Kanwil jatim dan LPP Malang; 2. Kinerja reformasi Birokrasi pada kanwil Jatim dan LPP Malang; 3. Kinerja UKPBJ dan Kehumasan pada Kanwil Jatim dan LPP Malang;	1 Dokumen
	Administrasi	Terlaksananya layanan administrasi	1 layanan	

	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan	penyusunan evaluasi dan pelaporan		
	FGD Rencana Strategis BPSDM Dan HAM 2020-2024 TA 2023	Review Terlaksananya FGD Review Renstra BPSDM Hukum dan HAM TA. 2023 pada tanggal 8 Maret 2023 di hotel Gran Melia Jakarta	1 Dokumen	
	Workshop Penyusunan TA 2023	Lkjip Terlaksananya Workshop LKjIP TA. 2023 tanggal 3 s.d 5 Desember 2023 di Hotel Gran Melia Jakarta	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM Semester I	Capaian Terlaksananya Evaluasi Capaian Kinerja Semester I di Hotel Pesona Alam Puncak pada Tanggal 9 s.d 11 Agustus 2023	1 Dokumen	
	Kegiatan Internalisasi Percepatan Tugas Dan Fungsi BPSDM Dan HAM	Internalisasi Terlaksananya kegiatan Internalisasi Percepatan Tugas Dan Fungsi Bpsdm Hukum Dan HAM (Sosialisasi Permenkumham tentang organisasi dan tata kerja baru)	1 Dokumen	
	Administrasi Kelembagaan	Pelaksanaan Administrasi Kelembagaa	1 layanan	
	Workshop Penyempurnaan SOP	Terlaksananya Workshop Penyempurnaan SOP dengan total 624 SOP pada 25 s.d 27 September pada Hotel Aston Bogor	1 Dokumen (624 SOP)	
	Restrukturisasi Kelembagaan Penggabungan Politeknik	Terlaksananya restrukturisasi kelembagaan penggabungan Politeknik pada 13 s.d 16 Desember 2023 pada Hotel <i>The hermitage</i> Jakarta	1 Dokumen (5 Laporan Porja)	
2	Kepegawaian	Workshop Tunas Integritas BPSDM Hukum Dan HAM	Terlaksananya Workshop Tunas Integritas pada 15 s.d 17 maret 2023 hotel <i>The Grove Suites</i> Jakarta	1 dokumen
	Penguatan dan Pendampingan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pendampingan Zona Integritas Menuju WBBM pada Badiklat Hukum dan HAM jawa Tengah (26 s.d 28 Juli 2023) dan Poltekim (22 Februari 2023)	1 Dokumen	
	Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Terlaksananya penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Wisma Pengayoman 18 s.d 22 Desember 2023	1 Dokumen	

Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian (Adm Jabfung Pemberhentian dan Umum Mutasi Kepegawaian)	Terlaksananya Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian (Adm Jabfung Pemberhentian dan Umum Mutasi Kepegawaian) melalui pelaksanaan senam	1 Layanan
Administrasi Jabatan Fungsional di lingkungan BPSDM	15 Terlaksananya Administrasi Jabatan Fungsional di lingkungan BPSDM	15 Jabatan 1 Layanan
Pembinaan Mental, Fisik dan Penguatan Disiplin Pegawai	Terlaksananya pembinaan mental, fisik, dan disiplin pegawai, penguatan tugas dan fungsi PPK, Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang dan Jasa	1 Dokumen
Pengembangan Mandiri Pegawai	Terselenggaranya kegiatan pengembangan mandiri bagi pegawai BPSDM Hukum dan HAM (26 pegawai penerima biaya pengembangan mandiri pegawai)	26 Biaya Pengembangan Mandiri
Administrasi Fasilitas Reformasi Birokrasi, Spip, Pembangunan ZI, WBK dan WBBM	Terselenggaranya layanan administrasi fasilitas RB, SPIP, ZI, WBK dan WBM di lingkungan BPSDM	1 layanan
Pencetakan Publikasi Pembangunan ZI	Tersedianya spanduk, poster, roller banner dalam rangka publikasi pembangunan ZI	1 Laporan
Administrasi Jabatan Fungsional Dan Pemberhentian	Terselenggaranya layanan administrasi jabatan fungsional dan pemberhentian di lingkungan BPSDM	1 layanan
Penguatan Tata Nilai BerAkhlak bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	Terselenggaranya Penguatan Tata Nilai BerAkhlak bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	1 dokumen
Sosialisasi Aplikasi Pengembangan Kompetensi Rumah Belajar	Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi Pengembangan Kompetensi Rumah Belajar	1 Laporan
Workshop Tunas Integritas BPSDM Hukum dan HAM	Terselenggaranya Workshop Tunas Integritas BPSDM Hukum dan HAM	1 dokumen

	Administrasi Jabatan Fungsional Lingkungan BPSDM dan HAM	10 di Hukum	Terselenggaranya Administrasi 10 Jabatan Fungsional di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM	1 layanan
3	Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan : 1. Administrasi Pelaksanaan Anggaran, 2. Rekonsiliasi Keuangan 3. Penyusunan Laporan Keuangan di BPSDM Hukum dan HAM 4. Penguatan Perpajakan 5. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit	1 layanan
		Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya 1. Gaji dan Tunjangan untuk PNS dan PPNPN BPSDM 2. Uang lembur PNS BPSDM	1 layanan
4	Umum	Layanan BMN	Terselenggaranya kegiatan: 1. Penatausahaan dan Pengelolaan BMN 2. Monitoring dan Evaluasi BMN	1 layanan
		Layanan Humas	Terselenggaranya kegiatan: 1. Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 2. Penyediaan informasi publik	1 layanan
		Pelaksanaan Kerja Sama	Pelaksanaan kerjasama dengan 23 Lembaga Diklat seluruh Indonesia untuk pelaksanaan Pelatihan PKA/PKP Kemenkumham	23 dok kerjasama
		Layanan Protokoler	1. Koordinasi dan Pelaksanaan Keprotokoleran 2. Pelaksanaan Keprotokoleran	1 layanan
		Layanan Umum	Terselenggaranya layanan : 1. Layanan Urusan Kerumahtanggaan 2. Keperluan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 3. Asisten Pengadaan, Pemeriksaan, Penerimaan, dan Pemeliharaan Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi	1 Layanan
	Layanan Perkantoran		Terselenggaranya layanan dan pengadaan: 1. Gaji dan tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Kendaraan dinas operasional (sewa 13 unit kendaraan operasional) - Belanja pemeliharaan dan perawatan mesin 3. Langganan daya dan jasa 12 bulan 4. Pemeliharaan gedung, pagar dan	1 layanan

	halaman	
	5. Pemeliharaan peralatan perkantoran	
	6. Belanja keperluan perkantoran	
	7. Sewa	
	8. Pengadaan pakaian dinas	
	9. Jamuan Tamu	
	10. Konsultasi/koordinasi	
	11. Pengelolaan keuangan dan BMN	
	12. Kesehatan Pegawai	
	13. Penanganan covid	
Layanan Sarana Internal	Terselenggaranya layanan dan pengadaan: 1. Perangkat pengolah data dan informasi 38 PC, 8 laptop, 10 scanner, 10 LCD Proyektor, 15 printer, 1 printer dot matrik, 7 laptop, 2 pc fungham, 2 telephone mobile, 3 tablet pc 2. Kendaraan Bermotor (2 mobil pickup dan 1 ambulance)	1 layanan

Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar Rp. 112.486.909.605,- atau 98,63% dari pagu Rp. 114.052.258.000,-. Berikut rincian penyerapan anggaran per Bagian di Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM:

Realisasi Anggaran Bagian Program dan Pelaporan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Perencanaan dan Penganggaran	1.142.499.000	1.139.177.405	99.71
2	Pemantauan dan Evaluasi	3.101.893.000	3.031.341.042	97.73
3	Pengelolaan Kelembagaan	1.001.352.000	936.364.050	93.51

Realisasi Anggaran Tusi Kepegawaian

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Administrasi Kepegawaian	84,090,000	65,985,702	78.47
2	Pembinaan Kepegawaian	345.218.000	315.879.883	91.50
3	Layanan Reformasi Kinerja	495.502.000	479.761.381	96.82

Realisasi Anggaran Tusi Keuangan

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Gaji dan Tunjangan	20.579.931.000	20.213.076.930	98.22
2	Layanan manajemen keuangan	446.000.000	420.205.026	94.22

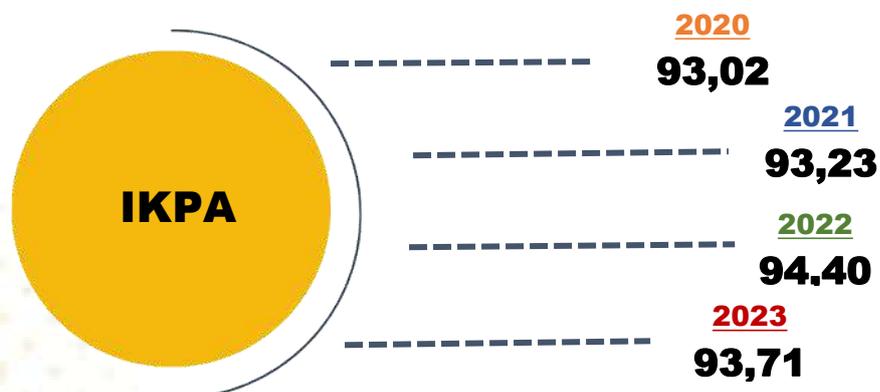
Realisasi Anggaran Bagian Umum

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Layanan sarana internal	8.497.607.000	8.472.769.690	99,71
2	Layanan Prasarana internal	40.108.835.000	40,010,101,400	99,75
3	Layanan BMN	732.992.000	485.767.924	66,27
4	Layanan Kearsipan	37.520.000	32.156.100	85,70
5	Layanan Kehumasan	487.725.000	437.990.088	89,80
6	Layanan Protokoler	112.274.000	93.871.272	83,61
7	Layanan Umum	633.847.000	568.392.109	89,67
8	Layanan Perkantoran	56.824.904.000	56.101.568.138	98,73

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berikut capaian nilai IKPA BPSDM Tahun 2020-2023:



Tahun anggaran 2023 nilai IKPA BPSDM Hukum dan HAM mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai IKPA tahun 2022 (94,40), dan juga tidak mencapai target tahunan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yaitu nilai 95 dengan nilai IKPA pada tahun 2022 sebesar 94,40. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut dimana pada komponen kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran, hanya kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output yang sesuai dengan bobot nilai akhir

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DPA	Deviasi Halaman BI DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	01312	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Nilai	100.00	70.45	89.88	82.88	87.74	86.24	100.00	100.00	81.71	100%	83.71
			Bobot	18	18	20	18	18	18	5	25			
			Nilai Akhir	18.00	7.05	17.96	8.28	9.77	9.62	5.00	25.90			
			Nilai Aspek	85.23		88.38			100.00					

Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan *Disburstmen Plan* yang telah ditetapkan menyebabkan nilai komponen kualitas perencanaan anggaran tidak maksimal. Demikian halnya dengan nilai komponen kualitas pelaksanaan anggaran dimana penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP serta dispensasi SPM juga tidak maksimal. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran BPSDM hukum dan HAM dan Satuan kerjanya ditahun 2024

Salah satu komponen dalam indikator IKPA adalah belanja kontraktual untuk pagu Belanja Modal (53) berikut Realisasi Kinerja Belanja Modal 53 yang menjadi tanggung jawab Sekreteriat BPSDM Hukum dan HAM.

a. Pembangunan Gedung rektorat

Kegiatan	Pelaksanaan		Anggaran		Output Kegiatan	Kendala/Hambatan	Faktor Penunjang Keberhasilan
	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Target	Realisasi			
Pembangunan Gedung Rektorat Akademik	November-Desember	Tangerang	31.501.156.000	31.501.054.000	Gedung Bangunan	Jangka waktu Pelaksanaan Konstruksi Kurangnya respon penyedia menanggapi permintaan cuaca hujan	Monitoring berkala; rapat dan evaluasi pekerjaan tiap minggu
Pengelolaan kegiatan	Januari-Desember	Tangerang	346.843.000	346.783.737	Monitoring dan Evaluasi		
Konsultan Perencana	Agustus	Tangerang	1.635.000.000	1.634.511.350	Perencanaan Pembangunan Gedung Rektorat Akademik; Masterplan Politeknik	Kurangnya respon penyedia menanggapi permintaan PPK; hasil kerja tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga ahli.	rapat progres dan evaluasi pekerjaan tiap minggu
Konsultan Pengawas	November	Tangerang	880.000.000	861.481.500	Pengawasan Kegiatan	hasil kerja tidak sesuai dengan	rapat progres dan evaluasi

					Pembangunan Rektorat Akademik	kualifikasi ahli.	tenaga	pekerjaan tiap minggu	tiap
--	--	--	--	--	-------------------------------------	----------------------	--------	-----------------------------	------

b. Pembangunan Lapangan Tenis

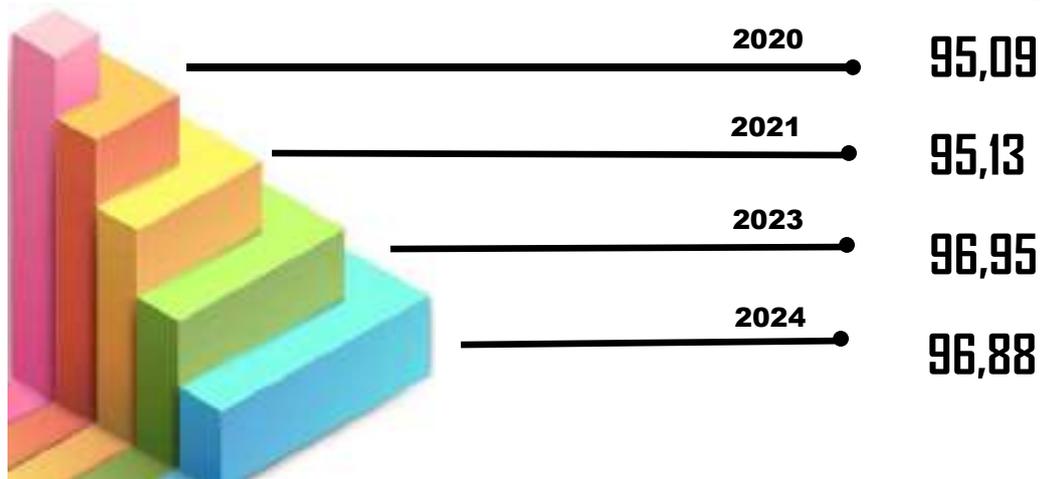
Kegiatan	Pelaksanaan		Anggaran		Output Kegiatan	Kendala/ Hambatan	Faktor Penunjang Keberhasilan
	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Target	Realisasi			
Pembangunan atap lapangan tenis	September	Gandul, Cinere	4.304.000.000	4.260.821.241	Atap kanopi lapangan tenis	Cuaca Hujan.	Monitoring berkala; rapat progres dan evaluasi pekerjaan tiap minggu
Pembangunan ruang ganti dan tribun	September	Gandul, Cinere	899.000.000	891.562.776	Ruang ganti dan tribun		
Biaya Perencanaan Lapangan Tenis	September	Gandul, Cinere	98.700.000	98.679.000	Perencanaan pekerjaan		
Biaya Pengawasan Lapangan Tenis	Juli	Gandul, Cinere	97.700.000	97.648.550	Pengawasan pekerjaan		
Biaya Pengelolaan Kegiatan Lapangan Tenis	April-September	Gandul, Cinere	227.000.000	198.123.246	Monitoring dan evaluasi		

Adapun nilai IKPA satuan Kerja BPSDM Hukum dan HAM pada Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Kode KPPN	Kode KA	Kode Subur	Uraian Subur	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Persentase Realisasi	Nilai Akhir (Nilai Total/Persentase Realisasi)
						Revisi SPPA	Deviasi Hakoran II DIPA	Penyempurnaan Anggaran	Batas Komersial	Penyesuaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispendat SPN				
1	101	012	408100	BINA PERSEKIPAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPOLISIAAN DAU	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00
					Beban	18	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	100,00		100,00					100,00			
2	101	012	408100	BINA PERSEKIPAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM RELAYES UTARA	Nilai	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	100,00	90,00	100%	90,00
					Beban	18	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	9,00	20,00	9,00	10,00	9,00	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	90,00		90,00					100,00			
3	101	012	108007	POLITEKNIK SIGRASI	Nilai	100,00	78,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	100,00
					Beban	18	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	7,83	20,00	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	85,14		100,00					100,00			
4	101	012	404000	POLITEKNIK SLMU PEMAS/PAKATARA	Nilai	100,00	83,95	100,00	87,86	83,00	90,00	100,00	100,00	90,00	100%	90,00
					Beban	18	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	8,40	20,00	8,79	9,00	9,00	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	91,00		90,00					100,00			
5	101	012	408107	BINA PERSEKIPAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Nilai	100,00	77,24	100,00	80,78	80,00	94,57	100,00	100,00	94,57	100%	94,57
					Beban	18	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	7,72	18,18	9,30	10,00	9,48	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	88,60		90,00					100,00			
6	101	012	108008	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Nilai	100,00	69,09	79,81	83,62	97,87	90,70	100,00	100,00	100,00	100%	100,00
					Beban	18	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	5,97	15,91	16,28	19,79	18,07	5,00	25,00			
					Nilai Aspek	78,85		80,41					100,00			

Penilaian Sistem Monitoring Evaluasi Terpadu (SMART)

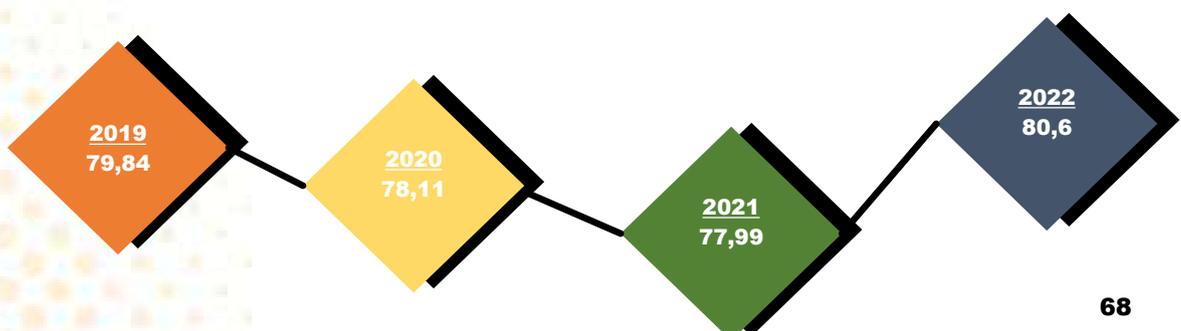
SMART merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Kementerian Keuangan guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024, telah ditetapkan target nilai SMART untuk tahun 2022 sebesar 95. Berikut capaian nilai SMART BPSDM Hukum dan HAM tahun 2020-2023:



Nilai SMART BPSDM Hukum dan HAM terkoreksi dari 96,95 pada 2022 menjadi 96,26 pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian format baru pelaporan kinerja pada Aplikasi SMART DJA dan Aplikasi Sakti. Namun demikian terhadap target pada Perjanjian Kinerja Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, maka capaiannya adalah melebihi target yang ditetapkan yaitu 95.

Penilaian SAKIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap institusi pemerintah diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut capaian nilai SAKIP BPSDM Tahun 2020-2022:



Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Hukum dan HAM Perubahan 2020-2024, target penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah memperoleh predikat BB (Sangat Baik). Dari grafik diatas dapat diketahui untuk tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM memperoleh nilai SAKIP sebesar 80,6 dengan predikat A (Memuaskan). Sehingga bisa disimpulkan, nilai SAKIP yang diperoleh BPSDM Hukum dan HAM sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024.

Rapat Koordinasi BPSDM Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM juga terus melakukan perubahan ke arah yang baik dalam rangka pelaksanaan pengembangan kompetensi dan penilaian kompetensi. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi, diperlukan peta jalan pengembangan kompetensi ASN dalam rangka terwujudnya pelayanan publik berkelas dunia. Oleh karena itu, perumusan kebijakan, perancangan kurikulum dan metode pengembangan kompetensi ASN harus disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang. Selanjutnya, kebijakan, kurikulum dan metode pembelajaran disinergikan untuk membangun desain program pengembangan kompetensi ASN yang lebih sistematis dan holistik khususnya dalam rangka mengakselerasi kinerja pelayanan publik berkelas dunia. BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit yang berfungsi melaksanakan peningkatan dan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu merumuskan bagaimana transisi dari pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang ada saat ini kepada model yang baru. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait baik pusat maupun daerah perlu dilakukan untuk memecahkan masalah perubahan tata kelola tersebut. Untuk menjamin pengembangan kompetensi ASN Kemenkumham yang mampu mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 ini merupakan langkah awal dari perubahan yang akan dilakukan BPSDM Hukum dan HAM.

Tujuan dari kegiatan ini, antara lain:

1. Mendapatkan *feedback* peningkatan dan penilaian kompetensi dalam hal kebutuhan pelatihan dari seluruh unit utama dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
2. Mengidentifikasi peta kebutuhan peningkatan dan penilaian kompetensi ASN khususnya kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosio-kultural dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM;

3. Mengidentifikasi strategi yang efektif dalam pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dan pelatihan baik klasikal maupun non klasikal serta metode lain yang diatur dalam UU ASN untuk mendukung terwujudnya tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan yang bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Penerima manfaat penerima dari kegiatan ini, Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan ini diselenggarakan dengan metode klasikal yang dilaksanakan pada;

Hari/Tanggal : Minggu-Selasa, 26-28 November 2023

Tempat : Hotel JS Luwansa Jakarta

NO	HARI TANGGAL JAM	KEGIATAN	LOKASI
Minggu, 26 November			
1	11.00 – 13.00	Kedatangan Peserta dilanjutkan dengan proses Perekaman absensi digital, penyerahan dokumen Perjalanan Dinas, dan pemeriksaan Kesehatan.	Ballroom Lantai II Hotel JF Luwansa
2	12.00 – 13.30	Makan Siang dan Ishoma	
3	14.00 – 15.00	Pengarahan dan Penguatan oleh Ka Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM tentang Rakor Evaluasi Kinerja Badan pengembangan SDM hukum dan HAM	
4	15.00 – 16.00	Penjelasan mekanisme Rakor Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM berikut.	
5	17.00 – 19.00	Ishoma	
6	19.00 – 21.00	Materi Motivasi Rakor Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM	
Senin, 27 November			
7	09.00 – 12.00	<p>UPACARA PEMBUKAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Hukum dan HAM dan Para Pimpinan Tinggi Madya Memasuki Ruangan 2. Persembahan Tari penyambutan 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 4. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM 5. Pembacaan Doa 6. Tarian Selamat Datang “ Tari Saman” 7. Laporan Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM 8. Penayangan Video Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM 9. Penyerahan Penghargaan Apresiasi 10. Penayangan Video <i>“Sejarah Lahirnya Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM”</i> 11. Penayangan Video <i>“Transformasi Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM”</i> 	

		12. Pembukaan secara resmi Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM 13. Sambutan Menteri Hukum dan HAM 14. Penampilan Band Taruna Politeknik Kemenkumham	
8	12.00 – 13.00	Istirahat	
9	13.00– 16.00	Pemaparan Materi oleh Narasumber dari: 1) Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara; 2) Kepala Pusdiklat Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan; 3) Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham; 4) Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham	
10	16.00 – 17.30	Pembahasan Komisi dalam 5 ruang breakout room	Ruangan Komisi I-V
11	17.30 – 19.00	Ishoma	
12	19.00 – 21.00	Pembahasan Komisi dan penyusunan Hasil Pembahasan per komisi	Ruangan Komisi I-V
Selasa, 28 November			
13	08.00-09.30	1. Paparan dan Pleno Hasil Pembahasan Komisi 1. 2. Paparan dan Pleno Hasil Pembahasan Komisi 2 3. Paparan dan Pleno Hasil Pembahasan Komisi 3 4. Penyusunan Hasil Rapat Pleno	Ballroom Lantai II Hotel JF Luwansa
14	09.30-10.00	UPACARA PENUTUPAN	

Peserta kegiatan ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-01.PR.05.02 Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia dan Peserta Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada saat pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM dihadiri 197 peserta yang terdiri dari:

1. Sekretaris Unit Utama;
2. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
3. Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Divisi Administrasi;

Sebagai narasumber dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini antara lain:

1. Pengarahan Bapak Menteri Hukum dan HAM;
2. Pengarahan Kepala BPSDM Hukum dan HAM;
3. Eloy Zalukhu, Capstone Consulting Indonesia;
4. Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara;

5. Kepala Pusdiklat Keuangan Umum Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham;
7. Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkumham

Kegiatan ini menghasilkan output utama yaitu :

1. Rekomendasi Rencana Kerja Pelatihan dan Penilaian Kompetensi Tahun 2024;
2. Rencana Aksi BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2024;
3. Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan SDM Kemenkumham.

Supervisi dan Monitoring Implementasi *Corporate University*

kegiatan Supervisi dan Monitoring Implementasi *Corporate University* bertujuan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan pengembangan kompetensi terintegrasi di lingkungan Kantor Wilayah sehingga dapat ditentukan tingkat keberhasilan dampak pengembangan kompetensi baik bagi pegawai dan instansi. Secara spesifik, evaluasi pasca pelatihan bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengetahuan tentang pengembangan kompetensi metode corpu;
2. Mengetahui kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi metode corpu;
3. Mengetahui relevansi materi pengembangan kompetensi metode corpu dengan tugas sehari-hari;
4. Mengetahui dampak pengembangan kompetensi metode corpu terhadap kompetensi dan kinerja pegawai;
5. Mengetahui dampak pengembangan kompetensi metode corpu terhadap organisasi

Hasil Supervisi dan Monitoring Implementasi *Corporate University* akan menjadi umpan balik untuk merencanakan kembali penyelenggaraan pengembangan kompetensi metode Corpu di masa mendatang dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja peserta. Kegiatan Supervisi dan Monitoring Implementasi *Corporate University* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diselenggarakan secara rutin pada beberapa Kantor Wilayah yang terpilih untuk menjadi locus pengumpulan data pada tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan kalender kegiatan yang telah disusun. Untuk tahun anggaran 2023 kegiatan ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah sebagai berikut:

No.	Kantor Wilayah	Tanggal Pelaksanaan
1.	Riau	19-22 Juli 2023
2.	Sumatera Utara	20-22 Juli 2023
3.	Nusa Tenggara Timur	26-28 Juli 2023
4.	Kalimantan Selatan	18 - 20 Oktober 2023
5.	Kalimantan Barat	25 - 27 Oktober 2023
6.	Papua Barat	01 - 03 November 2023
7.	Maluku	01 - 03 November 2023
8.	D.I. Yogyakarta	13 - 15 Desember 2023
9.	Aceh	19 - 21 Desember 2023
10.	Bali	20 - 23 Desember 2023
11.	Papua	19 - 23 Desember 2023

5. Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan mempunyai 3 program pendidikan yang terdiri dari Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Program Studi Manajemen Pemasarakatan, dan Program Studi Teknik Pemasarakatan. Berikut rincian jumlah taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Komposisi Taruna POLTEKIP

No	ANGKATAN/ TINGKAT	PROGRAM DIPLOMA			TOTAL
		Bimbingan Kemasyarakatan	Manajemen Pemasarakatan	Teknik Pemasarakatan	
1	Tingkat I (angkatan 58)	92	97	161	350
2	Tingkat II (angkatan 57)	101	114	132	347
3	Tingkat III (angkatan 56)	106	101	132	339
4	Tingkat IV (angkatan 53)	97	96	117	310
TOTAL		396 Taruna	408 Taruna	542 Taruna	1.346 Taruna

Kondisi pandemi Covid-19 yang dinyatakan telah berakhir berdampak pada metode kegiatan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) taruna dengan

kembali menggunakan metode tatap muka. Semua Taruna kembali mengikuti kegiatan di kampus Gandul dan Tangerang.

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, tahun 2023 telah meluluskan sebanyak 310 orang. Sesuai dengan Surat Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.03-574 tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan Angkatan 54 Tahun Akademik 2023 yang terdiri dari :

1. Program Studi Manajemen Pemasarakatan sebanyak 96 orang;
2. Program Studi Teknik Pemasarakatan sebanyak 117 orang;
3. Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan sebanyak 97 orang

Sesuai dengan perintah Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang tercantum dalam Surat Perintah Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.1-KP.04.01-5019 lulusan Poltekkip Angkatan 54 diperbantukan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Balai Pemasarakatan) di wilayah.

Selain mengikuti kegiatan akademik di lingkungan kampus Poltekkip, Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan banyak mengikuti kegiatan non-akademik berupa perlombaan maupun kejuaraan di berbagai bidang. Berikut ini adalah prestasi yang berhasil dicapai oleh para taruna Poltekkip:

Prestasi Taruna/Taruni Politeknik Ilmu Pemasarakatan

No	Penghargaan/Prestasi Kegiatan Berskala Nasional/Internasional	Output
1	Turnamen Bulutangkis Hari Bhakti Pemasarakatan ke - 59 (2 Taruna Tingkat III dan 1 Taruna Tingkat I)	Juara I
2	Penampilan Perdana Marching Band POLTEKIP dalam Acara Pembukaan Gerak Jalan IKA Alumni LEMHANAS RI (110 Taruna Tingkat III)	-
3	Ajang Pencak Silat Jakarta National Championship Tahun 2023	Medali Emas 1, Medali Perak 4, Medali Perunggu 6
4	Festival Seni Nusantara (FSN) Sekolah Kedinasan Tahun 2023	Medali Emas 1, Medali Perak 1, Medali Perunggu 2
5	Penampilan Marching Band POLTEKIP dalam Acara Pembukaan Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan oleh BPIP	-
6	Kejuaraan Nasional XXVII Tahun 2023 Silat Perisai Diri antar Perguruan Tinggi Piala Bergilir Presiden RI	Medali Emas 4, Medali Perak 2, Medali Perunggu 8

7	Lomba Artikel Ilmiah Nasional Universitas Mataram	Juara II
8	Turnamen Basket 5 on 5 Kapolri Cup 2023	Juara I
9	Kejuaraan menembak AA IPSC Perbakin 2023 kota Palembang	Juara II
10	Lomba Futsal Memperingati HDKD Ke-78 Di Lingkungan BPSDM	Juara III
11	E-Sport Festival Warna Warni Kemerdeka	Juara II
12	Lomba Vokal Solo Festival Seni Nusantara (FSN) Polbangtan Malang 2023	Juara I
13	Lomba Monolog Festival Seni Nusantara (FSN) Polbangtan Malang 2023	Juara II
14	Lomba Baca Puisi Festival Seni Nusantara (FSN) Polbangtan Malang 2023	Juara III
15	Lomba Drawing Arts Festival Seni Nusantara (FSN) Polbangtan Malang 2023	Juara III
16	Lomba Vokal Solo Festival Olahraga dan Seni (FORSE) UMIMA 2023	Juara I
17	Lomba Tari Festival Olahraga dan Seni (FORSE) UMIMA 2023	Juara II
18	Lomba Bulu Tangkis Festival Olahraga dan Seni (FORSE) UMIMA 2023	Juara II
19	Lomba Futsal Festival Olahraga dan Seni (FORSE) UMIMA 2023	Juara III
20	Lomba Fotografi Forum Kerjasama Rohani Islam (FOKRI) IX	Juara I
21	Lomba Infografis Forum Kerjasama Rohani Islam (FOKRI) IX	Juara III
22	Lomba Nasyid Forum Kerjasama Rohani Islam (FOKRI) IX	Juara II
23	Perlombaan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023	Juara III
24	Lomba Tari Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (PORSIMAPTAR) Akpol ke XXIII	Juara III
25	Lomba Mural Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (PORSIMAPTAR) Akpol ke XXIII	Juara II
26	Lomba Atletik Estafet 4x400 Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (PORSIMAPTAR) Akpol ke XXIII	Juara II
27	Lomba Fotografi Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (PORSIMAPTAR) Akpol ke XXIII	Juara III
28	Lomba Futsal Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (PORSIMAPTAR) Akpol ke XXIII	Juara II
29	Kejuaraan Taekwondo Kasal Cup Tahun 2023	Medali Emas 8, Medali Silver 3

Politeknik Ilmu Pemasarakatan dalam menjalankan kegiatannya didukung dengan layanan perkantoran yang menunjang kegiatan sehari-hari, berikut rincian anggaran Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip):

Anggaran Politeknik Pemasarakatan

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Prosentase
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.421.657.000	8.355.222.183	99,2 %
2	Layanan Manajemen SDM Internal	2.087.867.000	2.076.321.953	99,4%
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	128.221.000	125.090.466	97,5%
4	Jumlah	43.660.237.000	43.554.297.177	99,7 %

Dari sisi anggaran capaian Polteknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) pada tahun 2023 menyerap anggaran sebanyak Rp. **43.557.426.719,-** (98,7%) dari pagu anggaran yang telah ditargetkan sebesar Rp. **43.660.237.000,-**

6. Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi mempunyai 3 program pendidikan yang terdiri dari Program Studi Hukum Keimigrasian, Program Studi Administrasi Keimigrasian dan Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian. Berikut rincian jumlah taruna pada masing-masing program studi:

Komposisi Taruna POLTEKIM

NO	TINGKAT (ANGKATAN)	PROGRAM DIPLOMA			TOTAL ANKATAN
		HUKUM KEIMIGRASIAN	ADMIN KEIMIGRASIAN	MANAJEMEN TEKNOLOGI KEIMIGRASIAN	
1	Tingkat I (Angkatan 25)	118	117	76	311
2	Tingkat II Angkatan 24)	119	116	68	303
3	Tingkat III (Angkatan 23)	116	111	65	292
4	Tingkat IV (Angkatan 22)	164	89	42	295
TOTAL		517 Taruna	433 Taruna	251 Taruna	1.201 Taruna

Sama halnya dengan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, untuk tahun akademik 2023 metode kegiatan Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan (Jarlatsuh) taruna denganp kembali menggunakan metode tatap muka seiriing dengan telah berakhirnya pandemi Covid 19. Semua Taruna kembali mengikuti kegiatan di kampus Gandul dan Tangerang. Metode pembelajaran dan pengajaran pendidikan yang dilakukan oleh Dosen pada lingkungan belajar Politeknik Imigrasi memiliki tujuan agar taruna dapat mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Metode pembelajaran dan pengajaran dilakukan dengan kegiatan: Kuliah, Tanya Jawab, Presentasi Taruna, Diskusi, Penugasan, Demonstrasi, Simulasi, *Role Play / Bermain Peran*, Studi Kasus, *Interactive Teaching and Learning*, Pembelajaran Kooperatif, Pembelajaran Kolaboratif, *Drill / Latihan*, *Focus Group Discussion* (FGD), Seminar, Lokakarya (*Workshop*), dan *E-Learning*, dan lain - lain.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap taruna tingkat IV Tahun 2023 diketahui jumlah awal sebanyak 298 taruna namun selama proses pelatihan dan pengajaran akademik terjadi pelanggaran berat dan diputuskan dalam Rapat Dewan Dosen (RDD) pada tanggal 15 Mei 2023 dikeluarkan SK Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa *Drop Out (DO)* kepada Marco Edward Pontoh, Jodi Junior Palandi dan Yoga Fauzan Renardi, sehingga jumlah taruna Tingkat IV berkurang 3 orang dan sampai akhir kelulusan Tahun 2023 yaitu berjumlah 295 Taruna.

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Lulusan Poltekim antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Penempatan taruna Politeknik Imigrasi 100% diserahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai user utama dan pembina teknis dari Politeknik Imigrasi, dimana nantinya lulusan ini juga akan disebar ke seluruh UPT/Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan kompetensi jabatan yang dimiliki.

Taruna Politeknik Imigrasi banyak mengikuti perlombaan maupun kejuaraan di berbagai bidang berikut ini adalah prestasi yang berhasil dicapai oleh para taruna Poltekim:

Prestasi Taruna Poltekim 2023

NO	NAMA	PRESTASI	TINGKAT
1	M. Daffa Zhandra Yv	Juara 3 Lomba Esai Hari Difabel Internasional	II
2	Naufal Hadi	Juara 1 (Gold Medal) pada Lomba	III

		Nasional Invention Competition For Young Moslem Scientist (NICYMS) di Cabang Lomba IOT dan Aplikasi	
3	N. Fachreza Ardafa	Juara 1 (Gold Medal) pada Lomba Nasional Invention Competition For Young Moslem Scientist (NICYMS) di Cabang Lomba IOT dan Aplikasi	III
4	M. Daffa Ramadhan	Juara 1 (Gold Medal) pada Lomba Nasional Invention Competition For Young Moslem Scientist (NICYMS) di Cabang Lomba IOT dan Aplikasi	III
5	Muhadzib Rezki Hilmy	Juara 1 (Gold Medal) pada Lomba Nasional Invention Competition For Young Moslem Scientist (NICYMS) di Cabang Lomba IOT dan Aplikasi	II
6	Muhammad Naufal	Juara 1 (Gold Medal) pada Lomba Nasional Invention Competition For Young Moslem Scientist (NICYMS) di Cabang Lomba IOT dan Aplikasi	II
7	Afandi Nugraha Putra	Juara 3 Online Science Project Competition (OSPC)	III
8	Atsil Syah Gibran	Juara 3 Online Science Project Competition (OSPC)	III
9	Pasa Adelia Kautsar	Juara 3 Online Science Project Competition (OSPC)	III
10	Rizky Zuhri Wiyadi	Juara 3 Online Science Project Competition (OSPC)	III
11	Tuppal Oktavianus P Manalu	Juara 3 Online Science Project Competition (OSPC)	III
12	Regita Cahyani Rahmat	Gold Medal Lomba KTI OSPC	III
13	Anastasya Tri Andriani Hidayat	Gold Medal Lomba KTI OSPC	II
14	Rahel Elena Gultom	Gold Medal Lomba KTI OSPC	II
15	Atsil Syah Gibran	Peraih Medali Perak Lomba Inovasi Internasional IYSA NASPO	III
16	Rizky Zuhri Wiyadi	Peraih Medali Perak Lomba Inovasi Internasional IYSA NASPO	III
17	Muhammad Bagus Aldino	Peraih Medali Perak Lomba Inovasi Internasional IYSA NASPO	III
18	Dika Rahayu Arthari	Peraih Medali Perak Lomba Inovasi Internasional IYSA NASPO	III
19	Reza Akbar Pratama	Peraih Medali Perak Lomba Inovasi Internasional IYSA NASPO	III
20	Muhadzib Rezky Hilmy	Gold Medal Youth National Science Fair 2023	II
21	N. Fadly Khusairy	Gold Medal Youth National Science Fair 2023	II
22	Tesalonika Gloria Silalahi	Gold Medal Youth National Science Fair 2023	II
23	Eliska Bia Kusuma Putri	Gold Medal Youth National Science Fair 2023	II

24	Muhadzib Rezky Hilmy	Juara 1 (Gold Medal) Lomba National Applied Science Project Olympiad (NASPO)	II
25	M. Fadly Khusairy	Juara 1 (Gold Medal) Lomba National Applied Science Project Olympiad (NASPO)	II
26	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas Olimpiade Sains Mahasiswa OSSAN Bidang Geografi 2023	II
27	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas Kompetisi Sains Inovasi OSSI Puskanas 2023	III
28	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas Lomba Olimpiade Sains Mahasiswa ISO POSI 2023 Bidang Geografi	III
29	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas Olimpiade Sains Mahasiswa IYSC POSI 2023 Bidang Sejahtera	III
30	Atsil Syah Gibran	Juara 3/ Medali Perunggu Kompetisi OMMI Sains National Competition	III
31	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas Oспенas Puskanas Competition 2023	III
32	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas OSPC POSI Competition	III
33	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas KSPI Puskanas 2023	III
34	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas Kegiatan Future Science Olympiad 2023	III
35	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas Perlombaan NASPO IYSA 2023 (Internasional)	III
36	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas Perlombaan IISPO IYSA 2023 (Internasional)	III
37	Atsil Syah Gibran	Juara 3/ Medali Perunggu Perlombaan OSPC IYSA 2023 (Internasional)	III
38	Atsil Syah Gibran	Juara 1/ Medali Emas Perlombaan Sains Hardiknas 2023	III
39	Deva Ghita Anggraini	Juara 1 Lomba Oспенas 2023	III
40	Deva Ghita Anggraini	Juara 1 Lomba Olimpiade Muslim Muda Indonesia (OMM) Tahun 2023	III
41	Deva Ghita Anggraini	Juara 2 Lomba Olimpiade Sains Mahasiswa (OSM) Tahun 2023	III
42	Deva Ghita Anggraini	Juara 1/ Medali Emas OSPC Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI) Tahun 2023	III
43	Sarina Riyadi	Juara 2 Lomba Esai Nasional Science Education Fair Tahun 2023	II
44	Muhammad Choirul Yusuf	Juara 2 Lomba Esai Nasional Science Education Fair Tahun 2024	II
45	Kuncoro Wisnu Murti	Juara 2 Lomba Esai Nasional Science Education Fair Tahun 2024	II

46	Rafael Hutahaeen Rocco	Medali Emas Peringkat Pertama dalam Kompetisi Sains Bertajuk KOSMIK Tahun 2023	I
47	Dwidya Wahyu Ramadhani Soleman	Juara 2 Lomba Tulis Puisi Mahasiswa Tingkat Nasional Red Golden Media	II
48	Dwidya Wahyu Ramadhani Soleman	Juara 3 Lomba Tulis Cerpen Mahasiswa Tingkat Nasional RedGolden Media	II
49	Aric Pranoto	Juara 1 Lomba Fotogenic Be Proud Indonesia	II
50	Agha Dwi Mahendra	Juara 2 Kelas D Dewasa/Mahasiswa Putra 60-65 Kg	IV
51	Anas Alfaridza Suharjo	Juara 3 Kelas E Dewasa/Mahasiswa Putra 65-70 Kg	IV
52	Zhulvan Fuad Arafad	Juara 1 Kelas C Dewasa/Mahasiswa Putra 60-65 Kg	IV
53	M Rizal Mardiansyah	Juara 2 Kelas D Dewasa/Mahasiswa Putra 60-65 Kg	III
54	Ario Nanda Pratama	Juara 1 Kelas F Dewasa/Mahasiswa Putra &0-75 Kg	II
55	Dwi Handoko Putra	Juara 1 Kelas F Dewasa/Mahasiswa Putra 70-75 Kg	II
56	Ilham Maulana Prasetyo Gutomo	Juara 3 Kelas E Dewasa/Mahasiswa Putra 65-70 Kg	II
57	Muhammad hafiz Ghanim	Juara 3 Kelas G Dewasa/Mahasiswa Putra 75-80 Kg	II
58	Nur Fauzan Hafiz Arkanuddin	Juara 1 Kelas G Dewasa/Mahasiswa Putra 75-80 Kg	II
59	Ramadhany Bimo Sentanu	Juara 2 Kelas E Dewasa/Mahasiswa Putra 65-70 Kg	II
60	Alfian Sabri Ramadani	Juara 1 Lomba Desain Poster Digital Geofest VI Universitas Muhamadiyah Prof.Dr. Hamka	II
61	Muhammad Irfan	Juara 3 Lomba Karate Internasional Esa Unggul Cup	II
62	Anna Evita Maretta Panjaitan	Juara 3 Lomba Speech Cicero English Contest Universitas Warmadewa Bali	I
63	Timothy Indramora Manurung	Juara II International Karate Championship Esa Unggul IV	II
64	Abbel Maulana	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV
65	Javier Saviola	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV
66	Lasbeth Parulian Lamsihar	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV
67	Yahya Nurzama	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV
68	Marco Bagas Tribuana	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV

69	Aldi Raihan Zahy	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV
70	Prayugo Septyo	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV
71	Wildo Ferondinata	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV
72	M Fahruazi Muazamsyah	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV
73	Wais Alqomi hasibuan	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	IV
74	Revan Seiaji Lesmana	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	III
75	Lalu Muhammad Ferry Akbar	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	III
76	Amos Haratua Pangaribuan	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	III
77	Fazril Habib Manurung	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	III
78	Ryan Firmansyah	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	III
79	Rifki jabarul Anwar	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	III
80	Reza Achmad Fauzi	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	III
81	Achmad Asyraq Fadhillah	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	II
82	Joshua Bismadhika Arya Wicaksana	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	II
83	Bintang Bongiovi Ramdho Sabri	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	I
84	Jeremia Andara Kembaren	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	I
85	Hanif Nabhana Makhlusi	Juara 3 Lomba Sepak Bola pada Liga FISIP UI 2023	I
86	Muhammad Ilham Andriansyah	Medali Perunggu Lomba Vidio pada Malaysia Invention and Innovation Expo (MIX) 2023	III
87	Muhammad Levin Rakavinanda	Medali Perunggu Lomba Vidio pada Malaysia Invention and Innovation Expo (MIX) 2023	III
88	Muhammad Rizky Prayoga	Medali Perunggu Lomba Vidio pada Malaysia Invention and Innovation Expo (MIX) 2023	III
89	Kania Vionaldha	Medali Perunggu Lomba Vidio pada Malaysia Invention and Innovation Expo (MIX) 2023	III
90	Muhammad Surahmat Alfiandi	Medali Perunggu Lomba Vidio pada Malaysia Invention and Innovation Expo (MIX) 2023	III
91	Muhammad Khoiru Wafiq	Medali Perunggu Lomba Vidio pada Malaysia Invention and Innovation	II

		Expo (MIX) 2023	
92	Aurizia Fajri Ardana	Medali Perunggu Lomba Vidio pada Malaysia Invention and Innovation Expo (MIX) 2023	II
93	Danny Pujakesuma	Juara 2 Lomba Poster Archieve Competition	II
94	Anastasya Tri Andriani Hidayat	Juara 2 Lomba Poster Archieve Competition	II
95	Ikko Naya Firmansyah	Juara 2 Lomba Poster Archieve Competition	II
96	Nanda Bagoes Setyanto	Juara 3 Lomba Debat nasional Pilar Politik 2022-2023	III
97	Ferdyan Samuel Karunia	Juara 3 Lomba Debat Naisional Pilar Politik 2022-2023	III
98	Alif Muhammad Fajrin	Juara 3 Lomba Debat Naisional Pilar Politik 2022-2023	III
99	Passion Timothy Gerald Sianipar	Juara 3 Lomba Podcast Media Selaras Festival	II
100	Aura Zahra Puteri Suhendi	Juara 3 Lomba Podcast Media Selaras Festival	II
101	M Risyad Alfarabi	Juara 3 Lomba Podcast Media Selaras Festival	II
102	Mario Salomo Meha	Juara 3 Lomba Podcast Media Selaras Festival	II
103	Atsil Syah Gibran	Indonesia International Applied Science Project Olimpiad	III
104	Andhika Kamajaya	Indonesia International Applied Science Project Olimpiad	III
105	Habel Refo Hutabarat	Indonesia International Applied Science Project Olimpiad	III
106	Ifrans Aqidah	Indonesia International Applied Science Project Olimpiad	III
107	Muhammad Dzaky A.G	Indonesia International Applied Science Project Olimpiad	III
108	Deva Ghita Anggraini	Indonesia International Applied Science Project Olimpiad	III
109	Rafi Dewanto	Indonesia International Applied Science Project Olimpiad	II
110	Michael Habel Sinurat	Juara II Kata Perorangan Putra Sabuk Hitam Juara III Kumite Senior Putra +84	II
111	Dinar Afdhal Nugraha	Juara II kumite Putra +60 Sabuk Coklat	II
112	Timothy Indramora Manurung	Juara III Kumite Senior Putra +84	II
113	Rezky Catur Kurniatio	Juara I Kumite Putra +60 Sabuk Kuning	I
114	Virda Anika Wahyuni	Juara II Kata Perorangan Putri Sabuk Coklat	I
115	I Made Dwi Dharma Wirawan	Juara I Kata Perorangan Putra Sabuk Biru	I

116	Hana Kartika	Juara II Kumite Putri +50 Sabuk Coklat	I
117	Ni Kadek Siva Ayu	Juara II Kumite Putri + 50 Sabuk Biru	I
118	Siera Samudra Joan P Surbakti	Juara II Kata Perorangan Putra Sabuk Coklat	I
119	Michael Habel Sinurat	Juara 3 Lomba Video Edukasi HUT HKMF Universitas Sriwijaya tahun 2023	II
120	Theresya Berlian	Juara 3 Lomba Video Edukasi HUT HKMF Universitas Sriwijaya tahun 2023	II
121	Irvan Alif Wiguna	Juara 3 Lomba Video Edukasi HUT HKMF Universitas Sriwijaya tahun 2023	II
122	Michael Gandhy Hutajulu	Juara 3 Lomba Video Edukasi HUT HKMF Universitas Sriwijaya tahun 2023	I
123	Kevin Ananda Ginting	Juara 5 Lomba Poster Nasional The 3 rd National ICE Design Competition Tahun 2023	II
124	Regita Cahyani Rahmat	Juara 3 Lomba Podcast HMJ Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2023	III
125	M Bayu Krisna Aji	Juara 3 Lomba Podcast HMJ Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2023	III
126	Redo Feruzi Armando	Juara 3 Lomba Podcast HMJ Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2023	III
127	Ferdyan Samuel Karunia	Juara 1 Lomba Quotes Tingkat Nasional Diksiditna 2023	III
128	Adira Khansa Ayu Herdiyan	Juara 1 Lomba Podcast Psychomatch Universitas Jakarta	II
129	Muhadzib Rezky H	Juara 1 Lomba Podcast Psychomatch Universitas Jakarta	II
130	Anastasya Tri AH	Juara 1 Lomba Podcast Psychomatch Universitas Jakarta	II
131	Ferdyan Samuel Karunia	Penulis Terbaik Cipta Puisi Quotes Msubshine jejak Publisher	III
132	Ferdyan Samuel Karunia	Juara 2 Cipta Quotes Tingkat Nasional Diksditna X Cakap Tahun 2023	III
133	Anna Evita Maretta Panjaitan	Juara 1 Perta Life Insurance Short Speech Competition Tahun 2023	I
134	Ferdyan Samuel Karunia	Juara 2 Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional Bersama Wadah karya Tahun 2023	III
135	Fakhri Muammar	Juara 3 Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional Bersama Wadah karya Tahun 2023	III

136	Timothy Indramora Manurung	Juara 3 IPDN Kemendagri Karate Open Championship Sirkuit III Forki Jabar -+75 Kg Senior Putra	II
137	Michael Habel Sinurat	Juara 3 IPDN Kemendagri Karate Open Championship Sirkuit III Forki Jabar + 84 Kg Senior Putra	II
138	Ahmad Ibro Albaiyyin	Juara 3 Short Movie Forki Games IX Tahun 2023	III
139	Alif Muhammad Fajrin	Juara 3 Short Movie Forki Games IX Tahun 2023	III
140	Kiki Ananda Mustari	Juara 3 Short Movie Forki Games IX Tahun 2023	III
141	Rohmah Sekar Kinasih	Juara 3 Short Movie Forki Games IX Tahun 2023	III
142	Safrudin Bachtiar Cahya Ramadhani	Juara 3 Short Movie Forki Games IX Tahun 2023	III
143	Vanessa Rizkita Pramono	Juara 3 Short Movie Forki Games IX Tahun 2023	III
144	Muhammad Sutan Rafikhasah	Juara 3 Short Movie Forki Games IX Tahun 2023	II
145	Rafi Dewanto	Juara 3 Short Movie Forki Games IX Tahun 2023	II
146	Sapta Kusuma Azhari	Juara 3 Short Movie Forki Games IX Tahun 2023	II

Politeknik Imigrasi dalam menjalankan kegiatannya di dukung dengan layanan perkantoran yang menunjang kegiatan sehari-hari, berikut rincian realisasi anggaran Politeknik Imigrasi:

Realisasi Anggaran Poltekim

No	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.053.570.000	9.018.355.949	99,6%
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	257.320.000	250.821.990	97,4%
3	Layanan Manajemen SDM Internal	32.047.311.000	32.046.654.745	99,9%
4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	897.498.000	897.498.000	100%
	Jumlah	42.255.699.000	42.159.048.834	99,7%

7. Balai Diklat Hukum dan HAM

Capaian kinerja pada tiga Balai Diklat Hukum dan HAM pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Capaian Kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM

Indikator	Kinerja		% Capaian	Anggaran (Rp)		% Capaian
	Target (RKAKL)	Realisasi		Target	Realisasi	
Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	51	57	111,7%	23.167.595.000	22.833.268.476	98,6%
Jumlah Lulusan Diklat Wilayah	19.132	22.482	117,5%			

No.	Balai Diklat Hukum dan HAM	Nama Pengembangan Kompetensi	Metode	Output Peserta
1.	Kepulauan Riau	Pelatihan Pelaksana pada Pos Yankomas (PJJ)	PJJ	149
		Sosialisasi PK Bangkom	Klasikal	53
		Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	PJJ	80
		Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	Blended	90
		Webinar Pola Karir dan Pembinaan jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat dan Pengamanan Masyarakat	Webinar	1.141
		Webinar Peningkatan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik melalui implementasi reformasi birokrasi tematik dan mitigasi maladministrasi	Webinar	578
		Pelatihan Protokoler	Klasikal	60
		Webinar Peningkatan Profesionalisme SDM dalam Rangka Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan Pencari suaka di Indonesia	Webinar	562

		Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan	Klasikal	70
		Pelatihan Strategi Hubungan Masyarakat Biro Humas, hukum dan Kerja Sama dalam Pengelolaan Informasi di Era Digital	MOOC	127
		Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan keimigrasian	MOOC	77
		Pelatihan Kesamaptaan	Klasikal	80
		Pelatihan Teknis Pemasarakatan Pemeriksaan Pelanggaran Tata Tertib	PJJ	40
		Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara	Klasikal	40
		Penumpukan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara	MOOC	183
		Analisis dan Evaluasi Perundang - Undangan	MOOC	172
		Penyusunan Peta Penyuluh Hukum	MOOC	72
		Webinar Nasional Strategi Komunikasi Efektif Dalam Budaya Kerja dan Pelayanan	Webinar	1.499
		Appostile	MOOC	240
		Workshop Manajemen Krisis	Workshop	50
JUMLAH				5.363
2	Jawa Tengah	Pelatihan Protokoler	Klasikal	40
		Webinar CoP penanggulangan Narkoba	Webinar/ CoP	2.065
		Pelatihan Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	Klasikal	40
		Seminar UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP	Seminar	160
		Pelatihan Tata Kelola Teknologi Informasi Keimigrasian	Klasikal	40
		Webinar CoP Workplace Learning (WPL)	Wbinar/ CoP	476
		Pelatihan Barang dan Jasa	Blended Learning	40

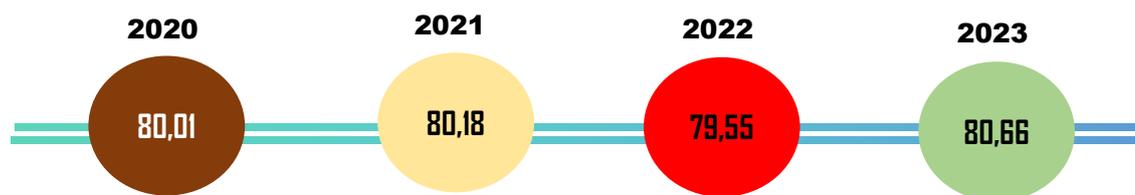
	Pelatihan Reformasi Birokrasi	MOOC	1.291
	Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan	PJJ	40
	Webinar CoP Digitalisasi dan Simplifikasi Pembayaran APBN	Webinar/CoP	320
	Pelatihan Status Keimigrasian	PJJ	40
	Webinar CoP Kreativitas dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Webinar/CoP	416
	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	PJJ	40
	Webinar CoP Back to Basic Pemasarakatan	Webinar /CoP	2.968
	Pelatihan Pelaksanaan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat	PJJ	40
	Pelatihan Protokoler	MOOC	744
	Pelatihan MTSL	MOOC	1.527
	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tinglkat Dasar	Klasikal	40
	Pelatihan Pelayanan Pengaduan dan Sidang Kode Etik	PJJ	40
	Pelatihan Pengamanan Tingkat dasar	PJJ	40
	Webinar CoP Smart Agility & Humble Team Work	Webinar/ CoP	1.024
	Webinar CoP Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Desa Kelurahan Sadar Hukum	Webinar/ CoP	956
	Pelatihan Kesemaptaan	Klasikal	40
	Pelatihan Teknis Dokumen Perjalanan RI	Klasikal	40
	Webinar CoP Konten Kreatif dan Berkualitas	Webinar / CoP	332
	Pelatihan Pengamanan Tingkat Lanjutan	Klasikal	40
	Pelatihan Dasar - Dasar HAM	PJJ	40

		Pelatihan Administrasi Perkantoran Tk. Dasar	PJJ	40
		Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	Klasikal	40
JUMLAH				12.959
3	Sulawesi Utara	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	Klasikal	40
		Pelatihan Protokoler	Klasikal	30
		Pelatihan Status Keimigrasian	PJJ	80
		Pelatihan Basic Trauma cardiac live Support (BTCLS)	Klasikal	74
		Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomnas	Klasikal	60
		Pelatihan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi (IT0 Governance Keimigrasian	Klasikal	80
		Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar	Klasikal	80
		Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan	Klasikal	80
		Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tk. Dasar	Klasikal	40
		Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasarakatan (Kesemaptaan)	Klasikal	80
		Pelatihan Teknis Pelayanan Pengaduan dan Sidang Kode Etik	Klasikal	40
		Pelatihan Dasar - Dasar HAM	PJJ	80
		Pelatihan Strategi dan Teknik Membangun Publikasi Pelayanan	PJJ	80
		Pelatihan Administrasi Perkntoran Tk. Dasar	PJJ	80
		Pelatihan Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)	MOOC/ PJJ	836
		Pelatihan Reformasi Birokrasi	MOOC/ PJJ	740
		CoP "Penegakan Disiplin Pegawai sesuai PP Nomor 94 tahun 2021"	Webinar	124
		CoP "Pentingnya Perencanaan Penarikan Dana Dalam Rangka Memperbaiki Pola Penyerapan Anggaran"	Webinar	137
		CoP "Peningkatan Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pencapaian Nilai IKPA Terbaik"	Webinar	139
		CoP "Peningkatan Peran dan Fungsi Humas Unit Pelaksana Teknis di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Webinar	116

	Sulawesi Utara”		
	Bimtek “ Kepegawaian”	Klasikal	30
	CoP “Tata Naskah Dinas	Webinar	967
	Webinar Penguatan Reformasi Birokrasi	Webinar	147
JUMLAH			4.160

B. Implementasi Reformasi Birokrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2023 telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang mencakup 9 (sembilan) program terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023. Nilai Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan Ham merupakan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga nilai Reformasi Birokrasi BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 menunggu proses penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian yang dilaksanakan di bulan Maret Tahun 2023. Berikut capaian nilai Reformasi Birokrasi BPSDM Tahun 2020-2023:



Berikut Rencana Kerja dan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

● TRIWULAN I

Rencana Kerja

Area	Rencana Kerja 2023	Data Dukung
Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim RB Kemenkumham 	SK Tim dan Dokumen Rapat
	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Internalisasi tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan berkesinambungan tentang Program-Program 	Dokumen Rapat

Area	Rencana Kerja 2023	Data Dukung
	Percepatan RB	
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB 	Laporan Kegiatan
	<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi Tata Nilai PASTI dan BerAKHLAK 	Capture Pemanfaatan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Kepmenkumham M.HH-12.OT.03.01 Tahun 2020 	SK Tim dan Dokumen Rapat
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pekerjaan Sehari-hari 	Dokumentasi
	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Pemanfaatan aplikasi Sisumaker dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari 	Dokumentasi
Deregulasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Mengusulkan Progsun PP/Perpres/Permen (agenda setting) dan Latar Belakang/Prosedur RPUU disusun 	Dokumen Usulan
Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE 	SK Tim dan Dokumen Rapat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pelaksana Alih Media Arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 	SK Tim dan Dokumen Rapat
	<ul style="list-style-type: none"> Alih Media Arsip Manual dengan jra berketerangan Permanen 	Daftar Arsip dilakukan Alih Media
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 	SK Tim dan Dokumen Rapat
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Kemenkumham 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pembinaan Kearsipan 	SK Tim dan Dokumen Rapat
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kearsipan 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan Pengendalian BMN 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 	Laporan
Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran kinerja individu secara berkala setiap bulan 	Dokumen Pengukuran Kinerja Individu
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Coaching and Mentoring terkait capaian kinerja secara berkala 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Kinerja berdasarkan Capaian Kinerja 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2022 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap Bagian 	Dokumentasi dan Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Kinerja dan Keuangan secara Periodik melalui E-Monev, SMART, E-Tarja, dan E-Performance 	Capture
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 	Laporan

Area	Rencana Kerja 2023	Data Dukung
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 	Laporan dan Rekomendasi
Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Satgas tentang Penyelenggaraan SPIP 	SK Tim dan Dokumen Rapat
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP secara berkala (rekomendasi Itjen Tahun 2022) 	Laporan dan Rekomendasi Hasil
	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rekomendasi SPIP dari Berita Acara Itjen Tahun 2022 	Laporan dan Dokumen Rapat
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2022 Unaudited 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Rekomendasi MR (Berita Acara) Rekomendasi Itjen Tahun 2022 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Rencana Aksi Manajemen Risiko (Berita Acara) Rekomendasi Itjen Tahun 2022 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Hasil Rekomendasi Itjen Tahun 2022 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pengaduan E-LAPOR yang ditindaklanjuti secara terpadu dan tuntas 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Benturan Kepentingan 	SK Tim dan Dokumen Rapat
	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan 	Laporan dan Rekomendasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi hasil survey Kepuasan Masyarakat 	Dokumentasi
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi 	Laporan
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi LAPOR 	Laporan

Dari hasil pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di triwulan I tahun 2023 di atas, dapat dievaluasi sebagai berikut:

Capaian Triwulan I

Area	Capaian
Manajemen Perubahan	100%
Deregulasi Kebijakan	100%
Penataan Tatalaksana	91,11%
Penataan Sistem Manajemen SDM	100%
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	100%
Penguatan Pengawasan	100%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	100%

● TRIWULAN II

Program Kerja Triwulan II

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung
Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Standar Operasi Prosedur 	Laporan dan Dokumen Rapat
Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE 	SK Tim dan Dokumen Rapat
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Secara Periodik Melalui (e-Monev, SMART, e-Tarja, dan e-Performance 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Satuan Kerja Tahun 2022 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja pada Website Kemenkumham 	Laporan
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Service</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi/Publikasi 6 Komponen Service Delivery dalam Dokumen Standar Pelayanan 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Maklumat Pelayanan 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi LAPOR 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dalam rangka Memberikan Pelayanan yang Mudah, Murah, Cepat dan Terjangkau 	Rekapitulasi pelayanan berbasis IT dan <i>Capture</i> Seluruh Layanan Online
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi 	Laporan Pelaksanaan Kampanye Publik

Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Unit Kerja WBK/WBBM 	Laporan Monitoring Pembangunan ZI
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kegiatan Pemantauan Penanganan Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 	Laporan
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Benturan Kepentingan 	SK Tim dan Dokumen Rapat
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Benturan Kepentingan 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan 	Laporan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kearsipan 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan 	SK Tim dan Dokumen Rapat
		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pembinaan Kearsipan 	SK Tim dan Dokumen Rapat
	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari Manual ke Digital)	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pelaksana Alih Media Arsip di lingkungan Kemenkumham 	SK Tim dan Dokumen Rapat
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN 	Usulan
		<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan dan Pengendalian BMN 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 	Laporan
Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak dan Berbasis Kinerja	Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen ASN secara Profesional	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM 	Laporan dan Dokumen Rapat
	Pengembangan Nilai-Nilai untuk Menegakkan Integritas ASN	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Internalisasi dan Publikasi Kode Etik Pegawai 	Laporan dan Dokumen Rapat

Capaian Triwulan II

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Standar Operasi Prosedur 	Laporan Evaluasi SOP Tahun 2022	80%
Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE 	SK Tim Tata Kelola SPBE Kemenkumham	100%
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian 	Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Coaching Mentoring April - Juni	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Secara Periodik Melalui (e-Monev, SMART, e-Tarja, dan e-Performance) 	Laporan e-Tarja, e-Monev, e-Performance, SMART Triwulan II	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 	Laporan Monev Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Triwulan II	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Satuan Kerja Tahun 2022 	LKJiP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja pada Website Kemenkumham 	Laporan Publikasi DIPA, Laporan Publikasi Renstra, Laporan Publikasi LKJiP	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi/Publikasi 6 Komponen Service Delivery dalam Dokumen Standar Pelayanan 	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Publikasi 6 Komponen Standar Pelayanan	100%
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Service</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Maklumat Pelayanan 	Laporan Publikasi Maklumat Pelayanan	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 	Laporan Publikasi Survei IPK-IKM Triwulan II	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi LAPOR 	Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui E-Lapor Triwulan I dan II	100%

		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dalam rangka Memberikan Pelayanan yang Mudah, Murah, Cepat dan Terjangkau 	Rekapitulasi pelayanan berbasis IT dan <i>Capture</i> Seluruh Layanan Online	100%	
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi 	Laporan Pelaksanaan Kampanye Publik Triwulan I dan Triwulan II	100%	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Unit Kerja WBK/WBBM 	Laporan Monitoring Pembangunan ZI Triwulan II	100%	
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kegiatan Pemantauan Penanganan Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Penanganan Risiko	100%	
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Benturan Kepentingan 	SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan Dokumen Rapat Pembentukan Tim	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Benturan Kepentingan 	Laporan Sosialisasi Benturan Kepentingan Triwulan I dan II	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan 	Laporan Monev Benturan Kepentingan	100%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kearsipan 	Laporan Pelaksanaan Pembinaan	100%
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan 			Draft SK Tim dan Dokumen Rapat	90%	
<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pembinaan Kearsipan 			Draft SK Tim dan Dokumen Rapat	90%	
Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari Manual ke Digital)		<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim Pelaksana Alih Media Arsip di lingkungan Kemenkumham 	SK Tim dan Dokumen Rapat	100%	

Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	• Penyusunan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	100%
		• Pengawasan dan Pengendalian BMN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun 2022	100%
		• Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran	Laporan Monev Realisasi Anggaran Triwulan II	100%
Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak dan Berbasis Kinerja	Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen ASN secara Profesional	• Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM	Dokumen Analisis Jabatan, Dokumen Rapat Kebutuhan, Surat Usulan Kebutuhan, Dokumen Kebutuhan, Dokumen Peta Jabatan	100%
	Pengembangan Nilai-Nilai untuk Menegakkan Integritas ASN	• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai	Laporan Monev Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai	100%
		• Internalisasi dan Publikasi Kode Etik Pegawai	Laporan Internalisasi dan Publikasi Kode Etik	100%

Capaian Triwulan II

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP	• Evaluasi Standar Operasi Prosedur	Laporan Evaluasi SOP Tahun 2022	80%
Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	• Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE	SK Tim Tata Kelola SPBE Kemenkumham	100%
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	• Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian	Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Coaching Mentoring April - Juni	100%
		• Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Secara Periodik Melalui (e-Monev, SMART, e-Tarja, dan e-Performance)	Laporan e-Tarja, e-Monev, e-Performance, SMART Triwulan II	100%
		• Monitoring dan Evaluasi Perjanjian	Laporan Monev Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target	100%

		Kinerja dan Target Kinerja	Kinerja Triwulan II	
		<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Satuan Kerja Tahun 2022 	LKJIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2022	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja pada Website Kemengkumham 	Laporan Publikasi DIPA, Laporan Publikasi Renstra, Laporan Publikasi LKJIP	100%
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Service</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi/Publikasi 6 Komponen Service Delivery dalam Dokumen Standar Pelayanan 	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi/Publikasi 6 Komponen Standar Pelayanan	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Maklumat Pelayanan 	Laporan Publikasi Maklumat Pelayanan	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 	Laporan Publikasi Survei IPK-IKM Triwulan II	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi LAPOR 	Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui E-Lapor Triwulan I dan II	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dalam rangka Memberikan Pelayanan yang Mudah, Murah, Cepat dan Terjangkau 	Rekapitulasi pelayanan berbasis IT dan <i>Capture</i> Seluruh Layanan Online	100%
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi 	Laporan Pelaksanaan Kampanye Publik Triwulan I dan Triwulan II	100%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Unit Kerja WBK/WBBM 	Laporan Monitoring Pembangunan ZI Triwulan II	100%
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kegiatan Pemantauan Penanganan Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Penanganan Risiko	100%
	Penguatan	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim 	SK Tim Penanganan	100%

	Upaya Pencegahan Korupsi	Benturan Kepentingan	Benturan Kepentingan dan Dokumen Rapat Pembentukan Tim	
		• Sosialisasi Benturan Kepentingan	Laporan Sosialisasi Benturan Kepentingan Triwulan I dan II	100%
		• Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan	Laporan Monev Benturan Kepentingan	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	• Pembinaan Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kearsipan	Laporan Pelaksanaan Pembinaan	100%
		• Pembentukan Tim Pengawasan Kearsipan	Draft SK Tim dan Dokumen Rapat	90%
		• Pembentukan Tim Pembinaan Kearsipan	Draft SK Tim dan Dokumen Rapat	90%
	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari Manual ke Digital)	• Pembentukan Tim Pelaksana Alih Media Arsip di lingkungan Kemenkumham	SK Tim dan Dokumen Rapat	100%
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	• Penyusunan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	100%
		• Pengawasan dan Pengendalian BMN	Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Tahun 2022	100%
		• Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran	Laporan Monev Realisasi Anggaran Triwulan II	100%
Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak dan Berbasis Kinerja	Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen ASN secara Profesional	• Pendampingan Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi Ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM	Dokumen Analisis Jabatan, Dokumen Rapat Kebutuhan, Surat Usulan Kebutuhan, Dokumen Kebutuhan, Dokumen Peta Jabatan	100%
	Pengembangan Nilai-Nilai untuk Menegakkan Integritas ASN	• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai	Laporan Monev Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai	100%
		• Internalisasi dan	Laporan	100%

		Publikasi Kode Etik Pegawai	Internalisasi dan Publikasi Kode Etik	
--	--	-----------------------------	---------------------------------------	--

● TRIWULAN III

Program Kerja Triwulan III

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	• Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian	Laporan
		• Penguatan Integritas Organisasi	Laporan
		• Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Secara Periodik Melalui (e-Monev, SMART, e-Tarja, dan e-Performance	Laporan
		• Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja	Laporan
		• Publikasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja pada Website Kemenkumham	Laporan
		• Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 (standar kinerja berbasis <i>logic model</i> sesuai ketentuan PermenPANRB nomor 89 tahun 2021)	Dokumen
		• Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Service</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	• Internalisasi Standar Pelayanan	Laporan
		• Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Standar Pelayanan Publik	Dokumen dan Laporan Evaluasi
		• Publikasi Dokumen Standar Layanan melalui Website	Laporan
		• Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi LAPOR	Laporan
		• Pembangunan Unit Kerja	Laporan
Meningkatnya Kualitas	Pembangunan Zona	• Pembangunan Unit Kerja	Laporan

Pengawasan	Integritas di Unit Kerja	WBK/WBBM	Monitoring Pembangunan ZI
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	• Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Tim Penilai Internal SPIP 2022	Laporan
		• Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Dokumen Penerapan Penanganan Risiko
		• Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal dan Internal	Laporan Hasil Audit Eksternal dan Internal
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan	Laporan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	• Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip, Pemeliharaan Arsip dan Penyusutan Arsip	Laporan
		• Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan Meliputi Pengelolaan Arsip Aktif	Laporan
		• Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan Meliputi Pengelolaan Arsip Inaktif	Laporan
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	• Pengawasan dan Pengendalian BMN	Laporan
		• Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran	Laporan
		• Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Temuan dan Rekomendasi Reviu Tim Pemeriksa Internal	Laporan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	• Pelaksanaan Layanan Publik	Laporan
	Pengembangan Nilai-Nilai untuk Menegakkan Integritas ASN	• Melakukan <i>Public Campaign</i> Penegakan Disiplin Untuk Internal Pegawai Masing-Masing Satker	<i>Capture</i>

Dari hasil pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi di triwulan III tahun 2023 di atas, dapat dievaluasi sebagai berikut:

Capaian Kinerja Triwulan III

Sasaran	Capaian
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Service</i>)	96%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	96%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	100%
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	100%
Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak dan Berbasis Kinerja	100%

Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Area	Capaian
Manajemen Perubahan	61,11%
Penataan Tatalaksana	18,75%
Penataan Sistem Manajemen SDM	100%
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	33,33%
Penguatan Pengawasan	92,19%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	82,22%
Komponen Hasil	100%

● TRIWULAN IV

Program Kerja Triwulan IV

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung
Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM pasca Penyederhanaan 	Laporan
	Penyelarasan	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Standar 	Laporan

	Proses Bisnis dan SOP	Operasional Prosedur	
		<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Proses Bisnis Level II 	Laporan
Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kemenkumham Terkait Tugas dan Kewenangan BPSDM Hukum dan HAM 	Laporan
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Secara Periodik Melalui (e-Monev, SMART, e-Tarja, dan e-Performance) 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 	Laporan
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Service</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 	Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dalam Rangka Memberikan Pelayanan yang Mudah, Murah dan Cepat, dan Terjangkau 	Rekapitulasi Pelayanan dan Capture Layanan
		<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi 	Laporan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Unit Kerja WBK/WBBM 	Laporan Monitoring Pembangunan ZI
	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 	Laporan
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan 	Laporan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan 	Laporan
	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari Manual ke Digital)	<ul style="list-style-type: none"> Alih Media Arsip Manual dengan jra Berketerangan Permanen 	Daftar Arsip
Meningkatnya Kualitas	Penguatan	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Usulan 	Usulan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penetapan Status Penggunaan BMN	
		• Pelaksanaan Pengamanan BMN	Rekapitulasi Data
		• Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran	Laporan
Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif dan Efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	• Uji Potensi dan Uji Kompetensi Manajerial Sosial Kultural	Dokumen
Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN Yang Adil, Layak dan Berbasis Kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	• Penyusunan Standar Kinerja SDM ASN Kemenkumham yang Selaras dengan Kinerja Organisasi	Laporan dan SKP
		• Pengukuran Kinerja SDM ASN Kemenkumham (SKP dan Perilaku)	SKP
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen ASN Secara Profesional	• Pendidikan dan Pelatihan Yang Terintegrasi	SK Pelatihan, Sertifikat, Laporan
	Pengembangan Nilai-Nilai untuk Menegakkan Integritas ASN	• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai	Laporan
		• Internalisasi dan Publikasi Kode Etik Pegawai	Laporan dan Dokumen Rapat

Capaian Triwulan IV

Sasaran	Sub Sasaran	Rincian Kegiatan	Data Dukung	Capaian
Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) / Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile	• Implementasi Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM pasca Penyederhanaan	Laporan Penerapan Struktur Organisasi Kemenkumham pasca Penyederhanaan	100%
		• Evaluasi Standar Operasional Prosedur	Laporan Evaluasi SOP	100%
	Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP	• Evaluasi Proses Bisnis Level II	Surat Pernyataan Evaluasi Proses Bisnis Level II	100%
Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	• Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kemenkumham Terkait Tugas dan Kewenangan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Arsitektur SPBE BPSDM Hukum dan HAM	100%

		BPSDM Hukum dan HAM		
Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Coaching Mentoring Bulan Oktober dan November • Surat Pernyataan Coaching Mentoring Bulan Desember 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Secara Periodik Melalui (e-Monev, SMART, e-Tarja, dan e-Performance 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan SMART Triwulan IV • Laporan E-Performance Triwulan IV • Laporan E-Tarja Triwulan IV • Laporan E-Monev Triwulan IV 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 	Laporan Monitoring dan Rekomendasi Hasil Evaluasi PK dan Tarja Triwulan IV	100%
Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Service</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 	Laporan Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan IV	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dalam Rangka Memberikan Pelayanan yang Mudah, Murah dan Cepat, dan Terjangkau 	Rekapitulasi Pelayanan Berbasis IT dan Capture Seluruh Layanan Online BPSDM Hukum dan HAM	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kampanye Publik dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi 	Laporan Pelaksanaan Kampanye Publik Semester II	100%
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Unit Kerja WBK/WBBM 	Laporan Monev ZI Triwulan IV	100%

	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Penanganan Risiko	100%
	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan Tindak Lanjut Benturan Kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Monev Benturan Kepentingan Triwulan IV • Dokumen Rapat Monev Benturan Kepentingan 	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Kearsipan 	Laporan Monev Tata Kelola Kearsipan	100%
	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari Manual ke Digital)	<ul style="list-style-type: none"> • Alih Media Arsip Manual dengan jra Berketerangan Permanen 	Daftar Arsip yang Dilakukan Alih Media	100%
Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN 	Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengamanan BMN 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi Pemasangan Tanda Pengaman Tanah Negara • Sertifikat Tanah BPSDM • Rekapitulasi Data Tanah dan Gedung BPSDM 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran 	Laporan dan Rekomendasi Hasil Monev Realisasi Anggaran Triwulan IV	100%
Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif dan Efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Uji Potensi dan Uji Kompetensi Manajerial Sosial Kultural 	Dokumen Hasil Uji Potensi dan Uji Kompetensi	100%
Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN Yang Adil, Layak dan Berbasis Kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Standar Kinerja SDM ASN Kemenkumham yang Selaras 	SKP Tahun 2023	100%

		dengan Kinerja Organisasi		
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran Kinerja SDM ASN Kemenkumham (SKP dan Perilaku) 	SKP Tahun 2022	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen ASN Secara Profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan Pelatihan Yang Terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Terintegrasi (MOOC) RB • SK Peserta Pelatihan MOOC RB • Sertifikat Pelatihan Terintegrasi (MOOC) RB • Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan MOOC 	100%
	Pengembangan Nilai-Nilai untuk Menegakkan Integritas ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai 	Laporan Monev Implementasi Peningkatan Disiplin Pegawai Tahun 2023	100%
		<ul style="list-style-type: none"> • Internalisasi dan Publikasi Kode Etik Pegawai 	Laporan Internalisasi dan Publikasi Kode Etik Pegawai Tahun 2023	100%

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPSDM Hukum dan HAM, sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2023 telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang mencakup 10 (sepuluh) sasaran yakni terimplementasikannya kebijakan penyederhanaan birokrasi; terimplementasikannya kebijakan arsitektur SPBE; terimplementasikannya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; terbangunnya pelayanan publik digital (*digital service*); meningkatnya kualitas pengawasan; meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral; meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset; terselenggaranya manajemen talenta ASN yang

efektif dan efisien; terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak dan berbasis kinerja; meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN yang terdapat pada Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan proses pembangunan zona integritas yang mencakup 6 (enam) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi telah mendistribusikan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi dan lembar kerja evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2023 kepada seluruh penanggung jawab kegiatan guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023.
4. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2023, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan seluruh kegiatan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi dan telah dilakukan evaluasi oleh evaluator dari Inspektorat Jenderal dengan hasil 100% tercapai.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan beberapa kegiatan pada lembar kerja evaluasi zona integritas. Dari hasil yang diperoleh, diketahui bahwa seluruh area perubahan di pembangunan zona integritas belum mencapai 100%.
6. Untuk seluruh area perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM belum mencapai 100% dikarenakan banyak data dukung yang belum diunggah ke dalam aplikasi ERB Kemenkumham dikarenakan belum terlaksananya dan terdokumentasinya seluruh kegiatan yang menunjang LKE WBK/WBBM dengan baik.

Rekomendasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu lebih banyak mengadakan kegiatan *benchlearning* ke Instansi Kementerian/Lembaga lain guna meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai eselon I pembina perlu lebih banyak melakukan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi kepada Politeknik dan Balai Pendidikan dan Pelatihan terkait implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan sosialisasi guna menyamakan persepsi dan sebagai bentuk komitmen bersama bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi bukan hanya menjadi tugas dan fungsi subkoordinasi reformasi birokrasi namun menjadi tugas dan fungsi seluruh unsur organisasi dan menjadi tujuan utama organisasi.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu memahami bahwa Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kegiatan.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan internalisasi dan penguatan kembali terkait pembangunan zona integritas menuju wbk/wbbm guna menyemangati pegawai bahwa walaupun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini tidak mengikuti kontestasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, namun tetap harus melakukan pengunggahan data dukung pada aplikasi ERB Kemenkumham sebagai salah satu bentuk proses pembangunan zona integritas.
6. Bagian Umum perlu melakukan pemantauan secara berkala terkait kinerja Hubungan Masyarakat dan Kerjasama guna menanggulangi kurang maksimalnya data dukung terkait administrasi pengelolaan pengaduan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengunggahan data dukung dalam aplikasi ERB Kemenkumham.
7. Unit Kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu lebih tertib administrasi, dikarenakan banyaknya kegiatan yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah diselenggarakan namun tidak ada dokumen dan laporannya sehingga tidak ada bukti yang dapat diunggah pada aplikasi ERB Kemenkumham.



BAB IV PENUTUP

LAPORAN TAHUNAN
BPSDM HUKUM DAN HAM

TAHUN 2023

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan, diketahui pada tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM telah berhasil melakukan pengembangan kompetensi kepada 141.099 orang pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baik dengan DIPA BPSDM Hukum dan HAM maupun anggaran PNPB dengan rincian sebagai berikut :



Selain melakukan pengembangan kompetensi terhadap Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, pada Tahun 2022 BPSDM Hukum dan HAM juga telah melakukan pengembangan kompetensi terhadap 590 Aparatur Penegak Hukum dan Instansi terkait lainnya yang termasuk dalam prioritas nasional melalui penyelenggaraan diklat Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 312 orang dan diklat Sistem Peradilan Pidana Anak sebanyak 267 orang, Berikut rincian

Capaian Diklat Prioritas Nasional



Selain bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki tugas melakukan penilaian kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini merupakan tanggung jawab Pusat Penilaian Kompetensi sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM melaksanakan tugas tersebut dengan menyelenggarakan kegiatan Uji Kompetensi, *Assessment Center*, Penilaian Kompetensi, terhadap pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM dengan total sebanyak 15.931 pegawai selama Tahun 2023.

BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian. Pendidikan kedinasan di bidang Pemasarakatan diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang pada tahun 2023 meluluskan taruna sebanyak 310 orang. Sedangkan pendidikan kedinasan di bidang Imigrasi diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi, pada Tahun 2022 telah meluluskan 295 taruna.

B. Saran

BPSDM Hukum dan HAM secara berkelanjutan terus berusaha mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerjanya di masa-masa mendatang. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan BPSDM Hukum dan HAM guna meningkatkan kinerjanya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan sarana pembelajaran di ruang kelas untuk menunjang kegiatan pelatihan dengan metode klasikal;

2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana asrama peserta pelatihan untuk memberikan kenyamanan para peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan;
3. Update kurikulum dan modul pelatihan agar sesuai dengan situasi perkembangan jaman;
4. Kuantitas dan kualitas pelaksanaan uji kompetensi perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang sangat besar. Diperlukan pengembangan teknologi informasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelaksanaan uji kompetensi;
5. Untuk dapat diperoleh data secara akurat dan pasti alumni peserta pelatihan yang sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya maka perlu dilakukan uji kompetensi terhadap peserta pelatihan sebelum dan sesudah melaksanakan pelatihan;
6. BPSDM Hukum dan HAM perlu untuk menambah bentuk-bentuk pengembangan kompetensi selain pelatihan klasikal dan e-learning dalam rangka meningkatkan output pelatihan dan merespon Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dimana setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
7. Pelaksanaan kegiatan baik pelatihan maupun non pelatihan agar memperhatikan kalender kegiatan dan disbursemenplan yang telah ditetapkan agar tidak mempengaruhi nilai IKPA dan juga SMART Direktorat Jenderal Anggaran yang menjadi nilai kinerja organisasi;
8. Melakukan pemantauan secara berkala kinerja BPSDM Hukum dan HAM dan Satuan Kerja sekurang-kurangnya per triwulan sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan untuk mendapatkan informasi terhadap capaian, hambatan/kendala, sehingga dapat dijadikan perbaikan pada kinerja triwulan berikutnya;
9. BPSDM Hukum dan HAM perlu melakukan review terhadap manual IKU yang telah disusun agar sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan;
10. Menyusun pedoman pelaksanaan administrasi BPSDM Hukum dan HAM yang dapat menjadi rujukan dalam melaksanakan tugas administrasi meliputi kinerja perencanaan, kinerja kepegawaian, kinerja keuangan, kinerja BMN, dan kinerja evaluasi dan pelaporan;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan:

- i. Penyerapan anggaran sesuai dengan *timeline* kalender kegiatan dan *Disbursement Plan* yang telah disusun;
 - ii. Optimalisasi anggaran sisa anggaran kegiatan yang telah selesai diselenggarakan;
 - iii. Pertanggungjawaban administrasi kegiatan terselesaikan tepat waktu;
 - iv. Unit dan Satuan Kerja melakukan langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang masih di bawah target.
12. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada Unit dan Satuan Kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM terkait updating peraturanperaturan terkait kinerja pelaksanaan anggaran

